

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI
MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Study Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/Mdn)**

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata I (S1) Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Oleh:

MOF FATHOR ROSI

NIM 1502026079

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H

Karang Malang Lor RT 04/RW 5 Sumbersari Ngampel Kendal- 51357

Drs. Hj. Naili Anafah, SHL., M.Ag

Jl. Sendang Utara Rt 05/Rw 08 Gemah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Moh Fathor Rosi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Moh Fathor Rosi

NIM : 1502026079

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Study Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1455/Pid.B/2017/MDN)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
NIP. 19730821 2000031002

Dr.Hj. Naili Anafah, SHL.,M.Ag
NIP. 198106222006042022

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H

Karang Malang Lor RT 04/RW 5 Sumbersari Ngampel Kendal- 51357

Drs. Hj. Naili Anafah, SHL., M.Ag

Jl. Sendang Utara Rt 05/Rw 08 Gemah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Moh Fathor Rosi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Moh Fathor Rosi

NIM : 1502026079

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Study Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1455/Pid.B/2017/MDN)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
NIP. 19730821 2000031002



Dr. Hj. Naili Anafah, SHL., M.Ag
NIP. 198106222006042022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Moh Fathor Rosi
NIM : 1502026079
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Study Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1455/Pid.B/2017/Mdn).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Mashudi, M.Ag (Penguji 1)
2. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH. (Penguji 2)
3. Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag. (Penguji 3)
4. Drs. H. Mohamad Solek, M.A. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: **3.73** (B+)

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ عَدْلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (5): 8).

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua kedua orangtua penulis Bapak Salam dan Ibu Sanima senantiasa mendorong penulis agar segera menyelesaikan proses pembuatan skripsi dan bisa dinyatakan lulus dan meraih gelar Sarjana Strata I (S1) Hukum, baik melalui nasehat maupun melalui do'a para beliau di sepanjang waktu dalam sholatnya.
2. Saudara kandung Penulis (Abi Sa'id dan Nurul Hudha), serta keluarga dan teman-teman penulis yang berasal dari kampung sana telah memberikan semangat kepada penulis baik itu secara langsung atau tidak langsung.
3. Teman-teman Prodi HPI-15 terkhusus (Nanda Risqi Rasmillah, Anik, Zidni, Abror, Zanu), yang telah bersama-sama menempuh pendidikan dalam bidang Hukum, lebih khususnya dalam Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Teman-teman mahasiswa penulis lainnya yang mereka namakan Yayasan Al-Kharonsih terkhusus (Rachmad, Erwin, Yushar, Wahib, Hartomo), yang telah bersama-sama mempunyai tekad menyelesaikan skripsi dan bisa lulus serta wisuda bersama-sama.
5. Teman-teman KKN MIT 7 posko 13 yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu memberikan semangat dalam perjalanan penyusunan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 20 Juni 2020

Deklarator



MOH FATHOR ROSI

NIM: 1502026079

ABSTRAK

Dalam sidang pembuktian perkara pidana dihadapi banyak terjadi seorang terdakwa/tersangka ataupun terpidana dijadikan saksi. Bahkan kesaksiannya dianggap istimewa, dalam pembuktian sangat menentukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas, namun dalam prakteknya saksi tersebut banyak dijumpai dalam persidangan. Salah satunya pembuktian kasus Penadahan perkara *Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn*, muncul saksi mahkota yang merupakan pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara berbeda *Nomor 1454/Pid.B/2017/PN.Mdn*. Penggunaan saksi mahkota tersebut merupakan suatu problematika, karena dalam pembuktian saksi mahkota digunakan dalam kasus yang terdapat dua delik berbeda, sehingga di khawatirkan bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau biasa disebut tindak pidana penyertaan (*deelneming*) . Dalam Hukum Pidana Islam penggunaan saksi mahkota yang juga merupakan pelaku tindak pidana dijadikan sebagai saksi adalah tidak relevan karena sebagai tambahan dalam islam saksi disyaratkan harus seorang yang adil.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam putusan Pengadilan Negeri Medan *Nomor 1455/Pid.B/2017/Mdn*. 2.) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kedudukan saksi mahkota dalam putusan Pengadilan Negeri Medan *Nomor 1455/Pid.B/2017/Mdn*.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (doktrinal). Bahan Hukum primer diambil dari *Putusan Nomor 1455/Pid.B.2017/PN.Mdn*, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 183 KUHAP dan 185 ayat (6) KUHAP. Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diporeleh dari buku-buku, makalah, jurnal dan dokumen-dokumen yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, kedudukan saksi mahkota dalam Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn telah sesuai dengan syarat-syarat penggunaan saksi yang telah ditentukan dalam hukum pembuktian. *Kedua*, Dalam Hukum Pidana Islam kesaksian saksi mahkota dalam pembuktian yang terdapat minimnya alat bukti hal ini sesuai dengan kebutuhan *hajiyyat* yang tidak mencapai kebutuhan *daruriyat* melihat ada kebutuhan dalam pembuktian dan dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan yang dilakukan ini jika tidak berhasil dibuktikan, selain itu adilnya seseorang saksi tergantung kepada penilaian hakim, apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya.

Kata kunci: Saksi Mahkota, Pembuktian, Penyertaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Study Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017.Mdn”**. Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dorongan, dukungan dan kontribusi yang baik dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H.
4. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Naili Anafah, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Moh Khasan, M.Ag. selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi agar lulus tepat waktu.
6. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas

7. Kedua orang tua, Bapak Salam dan Ibu Sanima yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis bisa dan mampu berlari menuju kesuksesan yang lebih baik dan berkah.
8. Saudara terkasih Penulis Abi Sa'id dan Nurul Hudha, serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis, semoga karya tulis ini jadi penyemangat diri agar lebih semangat dalam menimba ilmu.
9. Teman-teman HPI 2015 yang berjuang bersama dalam suka dan duka dalam masa perkuliahan.
10. Teman-teman Yayasan Al-Kharonsih yang bersama dalam suka dan duka dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
11. Teman-teman KKN MIT 7 Posko 13 Kelurahan Ngemplek Simongan Kecamatan Semarang Barat yang dalam suka dan duka saling memberikan semangat dalam perjalanan penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Juni 2020

Penulis,



MOH FATHOR ROSI
NIM: 1502026079

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	R	-
ز	Zāl	Z	-

س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

ص	Ṣād	Ṣ	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
ه	Hā'	H	-
و	Wāwu	W	-

ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
---	--------	---------------------------	---

ي	Yā'	Y	-
---	-----	---	---

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/*harakat fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au*

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فَاطِمَة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

1. Kata sandang () diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalama*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

- VII. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau

VIII. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāzi qīn* atau *khairurrāziqīn*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM HUKUM PIDANA POITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembuktian	
1. Pengertian Pembuktian	16
2. Alat Bukti.....	17
3. Dasar Hukum Pembuktian	22
4. Teori Pembuktian.....	23
B. Kesaksian	
1. Pengertian Kesaksian	26
2. Dasar Hukum Kesaksian.....	27

3. Syarat-Syarat Kesaksian	28
C. Saksi Dan Kesaksian Dalam Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Saksi	30
2. Dasar Hukum Saksi.....	32
3. Fungsi Saksi	32
4. Kedudukan Saksi	33
5. Kriteria Saksi	35

BAB III: KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1455/Pid.B/2017/Mdn

A. Profil Pengadilan Negeri Medan.....	46
B. Posisi Kasus	48
C. Saksi Mahkota.....	49
D. Kedudukan Saksi Mahkota Dan Putusan Hakim	55

BAB IV : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1455/Pid.B/2017/Mdn

A. Kriteria Saksi	67
B. Saksi Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Pidana Islam	71
C. Nilai Kesaksian	78
D. Diterima/Ditolaknya kesaksian	79

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran	83
C. Kalimat Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹ Menurut J.C.T. Simorangkir dkk² bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri, yaitu terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP.

Penerapan rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, maka di dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan “Bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”³ Untuk dapat membuktikan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan dijatuhi hukuman haruslah melalui proses pemeriksaan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa 2008), hal. 229.

² Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group 2014), hal. 230.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika 2008), hal. 22.

alat bukti dalam persidangan. Dalam proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah pembacaan dakwaan penuntut umum.⁴

Dalam Pasal 184 KUHP (ayat 1) dinyatakan bahwa, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Selanjutnya KUHP mendefinisikan Pasal 1 (angka 26), Saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 27).⁵

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, para ahli yang juga dihadirkan, begitupun surat atau petunjuk-petunjuk dan keterangan terdakwa merupakan bukti-bukti yang sah dalam proses pembuktian dalam hukum acara formil atau kita sebut hukum acara pidana, poinnya didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, harus hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Dalam hukum acara jinayah saksi selain berposisi sebagai salah satu pihak dalam proses peradilan, juga merupakan salah satu alat bukti pertama yang akan diperiksa di persidangan.⁶ Dalam kamus hukum saksi diartikan sebagai seorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar/merasakan suatu kejadian dalam perkara pidana ataupun perdata.⁷ Sedangkan kesaksian

⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta; Prenadamedia Grub 2016), hal. 132.

⁵ KUHP & KUHP, (Surabaya; Kesindo Utama 2015), hal. 190.

⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, hal. 66.

⁷ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Erlangga 2012), hal. 56.

merupakan kewajiban peradilan atas hakim untuk mewajibkannya, hukum mendatangkan kesaksian dengan segala syarat-syaratnya merupakan keharusan.⁸

Saksi mempunyai kedudukan penting dalam peradilan pidana, bahkan menurut R.J. Harris dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki⁹, tanpa adanya saksi sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi. Dalam Pasal 185 KUHAP ayat 6 (enam), dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ;

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.¹⁰

Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut pasal 168 KUHAP. Beberapa pihak dibawah ini tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ke tiga;
- c. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang sama-sama sebagai terdakwa. Atau dalam Pasal 170 ayat 1 (satu) KUHAP yaitu, mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi

⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2012), hal. 72.

⁹ I Made Sukadana, Amirul, Lalu Parman, "Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian" *Jurnal Law Reform* Volume 14, Nomor 2 Tahun 2018, hal. 267.

¹⁰ KUHP & KUHAP., hal. 253.

keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.¹¹

Dalam praktek peradilan pidana Indonesia dikenal beberapa macam-macam saksi, salah satunya adalah saksi mahkota. Dalam KUHAP sebagai induk hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, kita tidak akan dapat menemukan istilah saksi mahkota, ketentuan mengenai saksi mahkota baru dapat kita temukan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut, (Pasal 200 ayat 1 RUU KUHAP). Sebaliknya istilah saksi mahkota justru dapat ditemukan dalam praktik hukum acara pidana, yang salah satunya bersumber dari Putusan Mahkamah Agung RI No.1986 K/Pid/1989 tertanggal 21 maret 1990 berbunyi: bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pidana tersebut, sebagai saksi dipersidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam “satu berkas perkara” dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (*getsplit*). Teman terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya seperti tersebut diatas dalam ilmu hukum disebut “Saksi Mahkota” atau “*Kroon Getuige*”.¹²

Peradilan Indonesia dalam sidang pembuktian perkara pidana banyak terjadi seorang terpidana di jadikan saksi mahkota, bahkan kesaksiannya dianggap istimewa dan terkadang kesaksian tersebut sangat menentukan. Dalam KUHAP saksi ini memang tidak disebutkan secara tegas, namun dalam praktek penggunaan saksi tersebut masih sering kita jumpai dalam persidangan pidana.

Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa pentingnya saksi yang juga pelaku kejahatan yang merupakan “orang dalam” (*inner-cicle criminal*) karena dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan. Kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan. Ia dapat menyediakan bukti yang

¹¹ Andi Sofyan Dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.*, hal. 242.

¹² Albert Aries, “*Perbedaan Saksi Mahkota Dengan Justice Collaborator*”, di akses dari <https://m.hukumonline.com> pada 4 Februari 2020.

penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Selain dari memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala berpartisipasi dalam penyidikan pidana (*dramatis personae*) adalah saksi.¹³

Dalam pembuktian kasus penadahan yang menjerat Jiwa Sinulingga misalnya, muncul istilah saksi mahkota Rahayu Astuti Binti Sugiarto yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara berbeda *Nomor 1454/Pid.B/2017/PN.Mdn*, oleh karena itu dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.¹⁴ Penulis menganggap penggunaan saksi mahkota tersebut merupakan suatu permasalahan, karena dalam pembuktiannya saksi tersebut digunakan terhadap kasus yang terdapat dua delik yang berbeda. Sehingga di khawatirkan tidak memenuhi salah satu syarat penggunaan saksi tersebut yakni dalam hal adanya penyertaan (*deelneming*).

Jika mengacu pada Pasal 185 (Ayat 6), dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Maka saksi mahkota yang istilahnya muncul dalam acara pembuktian dalam kasus pencurian tersebut menjadi dikhawatirkan karena menimbang pada pasal 185 (Ayat 6 poin d), cara hidup dan kesusilaan saksi mahkota ini patut dikhawatirkan karena ia juga seorang terpidana. Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyebutkan, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri problemnya adalah manakala saksi tersebut adalah pihak yang diduga tidak jujur prilakunya juga dijadikan saksi.¹⁵

Praktek tersebut juga bertentangan dengan penjelasan pasal 168 KUHAP, bahwa tidak dapat didengar keterangannya, yang bersama-sama sebagai terdakwa. Bahkan penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan KUHAP dalam pasal 189 ayat (3) tiga, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Selanjutnya dalam *Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn* mengenai pembuktian dengan saksi mahkota hakim perpedoman pada Pasal 168 KUHAP yang pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan

¹³ I Made Sukadana, Amirul, Lalu Parman, *Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota.*, hal. 267.

¹⁴ *Putusan Nomor 1454/Pid.B/2017/PN.Mdn*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 4 Februari 2020

¹⁵ KUHAP & KUHAP., hal. 255.

tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan Pasal 189 KUHP, penggunaan keterangan tersangka tidak diatur dalam KUHP namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota, (Putusan MA No. 2437K/Pid.Sus/2011).

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, saksi tersebut juga dikenal penggunaannya yang dinyatakan: “Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian; (Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997).¹⁶

Dalam hukum pidana Islam penggunaan saksi mahkota yang statusnya merupakan seseorang terpidana dijadikan sebagai saksi dan kesaksiannya diperdengarkan dalam persidangan tidak relevan, karena seseorang yang menjadi saksi disyaratkan harus adil, firman Allah dalam Surah At-Thalaaq ayat 2;

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

¹⁶ Putusan Nomor 1454/Pid.B/2017/PN Mdn, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 4 Februari 2020.

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil”. (QS. Ath-Thalaaq; 2).¹⁷

Juga dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصَدِّقُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (QS. Al-Hujuraat; 6).¹⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan untuk menerima persaksian orang yang adil dan menanggukkan persaksian orang yang fasik, Kebalikan dari kata adil adalah fasik, yaitu orang yang selalu melakukan perbuatan haram, menonjolkan perbuatan maksiat, tidak menghiraukan perbuatan yang makruf/baik dan jujur, orang yang demikian itu kesaksiannya diragukan.

Kriterian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa-dosa kecil. Begitupun Syafi'iyah pada prinsipnya sama pendapatnya dengan Malikiyah.¹⁹ Ashbagh bin Faraj mengatakan, apabila seorang fasik memberi kesaksian di depan hakim, maka wajib atas hakim itu untuk menghentikan pemeriksaan perkara sampai dia mendapatkan kejelasan mengenai kesaksiannya.²⁰

Abu Muhammad Ali Bin Sa'id Bin Hazm,²¹ dalam kitab *Al-Muhalla* mengatakan bahwa, tidak boleh menerima kesaksian apapun dari kaum laki-laki maupun perempuan, kecuali dari orang yang adil dan direstui. Orang adil adalah orang yang tidak diketahui pernah melakukan dosa besar, atau tidak diketahui pernah melakukan dosa kecil secara terang-terangan. Dosa besar adalah dosa yang di sebut Rasulullah Saw, sebagai dosa besar atau dosa yang terdapat ancaman terhadapnya sedangkan dosa kecil adalah dosa yang tidak ada ancaman terhadapnya.

Allah berfirman dalam al-quran, berbunyi :

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta; Yayasan Pentafsir Al-Quran 1971), hal. 947.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., hal. 846.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika 2016), hal. 46.

²⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2006), hal. 302.

²¹ Abu Muhammad Ali Bin Sa'id Bin Hazm, *Al-Muhalla* (Jakarta; Pustaka Azzam 2016), hal. 682.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. An-Nur: 4).

Dengan ayat tersebut seseorang yang penuduh zina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi di beri hukuman dera 80 (delapan puluh) kali sebagai hukuman pokok dan tidak diterima kesaksiannya selalam-lamanya sebagai tambahan yang bersifat edukatif karena ia sudah tidak bisa berbuat adil lagi baik kepada Allah maupun sesama manusia lainnya.²²

Dari paparan yang dijelaskan diatas, nampak bahwa problematika atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan saksi mahkota menarik untuk diteliti. Bagaimana seorang terpidana dijadikan saksi dalam persidangan dan kesaksiannya digunakan membantu hakim untuk menegakkan keadilan. Sedangkan perilaku saksi tersebut mencerminkan sifat yang tidak adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang tidak diketahui pernah melakukan dosa besar (dosa yang terdapat ancaman terhadapnya), atau tidak diketahui pernah melakukan dosa kecil (dosa yang tidak ada ancaman terhadapnya) secara terang-terangan. Status persaksian saksi mahkota perlu dipertanyakan karena dalam Islam salah satu syarat-syarat saksi itu harus memiliki sifat adil dan saksi mahkota ini tidak memenuhi kriteria adil yang disebutkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul ; **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Study Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn)**. Dalam hal penulis memilih Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn karena penggunaan saksi mahkota dalam kasus tersebut berbeda dengan penggunaan saksi mahkota yang sering digunakan; yakni menyangkut pembuktian kasus penadahan (pembelian emas atau berlian tanpa dilengkapi surat-surat yang dapat diduga hasil dari kejahatan) yang bisa dikatakan kasus biasa dan pembuktiannya relatif lebih mudah dibandingkan dengan kasus-

²² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang; Cv Karya Abadi Jaya 2015), hal. 50.

kasus besar seperti korupsi, terorisme, narkoba atau pun kejahatan lainnya yang disebut kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Dalam kasus penggunaan saksi mahkota tersebut diatas, juga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau tindak pidana penyertaan yang didalamnya terdapat dua delik yang dilanggar, sehingga salah satu syarat bahwa saksi mahkota digunakan sebagai alat bukti dalam adanya penyertaan tersebut terlihat seperti pengembangan kasus saja, oleh penyelidik/penyidik untuk menjerat pelaku penadahan yang membeli barang hasil pelaku pencurian.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kedudukan saksi mahkota dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan saksi mahkota dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum pidana islam tentang kedudukan saksi mahkota dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn

2. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam Pidana Islam yang berkaitan dengan kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan referensi dalam rangka mengetahui sejauh mana saksi mahkota dibutuhkan keberadaannya dalam sidang pembuktian perkara pidana, serta bagaimana permasalahan keterangan saksi tersebut dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda.

Pertama, jurnal yang di tulis oleh Muh Amirudin²³, berjudul “Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar”. Menurut peneliti bahwa kekuatan alat bukti saksi Mahkota sama seperti saksi pada umumnya, hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur saksi dan disini saksi mahkota memenuhi semuanya yakni saksi yang mendengar, melihat dan mengalami langsung peristiwa dan manakala ia berada di bawah sumpah dalam mengungkapkan keterangan dalam persidangan. Jadi disini kekuatan alat bukti saksi mahkota sangat kuat. Apalagi hal itu dimungkinkan oleh KUHP, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan dianggap tidak bertentangan dengan hak asasi Terdakwa, dengan catatan Jaksa Penuntut Umum tidak memaksa terdakwa untuk menjadi saksi mahkota di persidangan meskipun berkas perkara diantara masing - masing terdakwa telah dipisah oleh Penuntut Umum, karena jika dipaksakan hal itu bertentangan dengan azas akusator yang dianut oleh sistem hukum acara kita. Implementasi atau penerapan penggunaan saksi mahkota dibenarkan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yakni dalam perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara. Akan tetapi Implementasi penggunaan saksi mahkota di Pengadilan Negeri Makassar tidak sesuai dengan syarat-syarat penggunaan saksi mahkota.

Kedua, jurnal yang di tulis oleh I Made Sukadana, Amirudin dan Parman²⁴, berjudul “Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian”. Menurut peneliti bahwa pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam hukum acara pidana indonesia tidak diatur dalam ketentuan pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana dan kategori keterangan saksi (mahkota) dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencurian adalah saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), di mana terdakwa yang satu

²³ Muh Amiruddin, “Tentang Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar” *Jurnal Jurisprudentie* Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017

²⁴ I Made Sukadana, Amiruddin & Lalu Parman, “Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian” *Jurnal Law Reform* Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018

dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Dwi Tania Wisna Yuliantari,²⁵ berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”. Menurut penulis, Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota (*koorn getuide*) dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana dapat di interprestasikan dengan saksi pelaku (*justice collaborator*) seperti, diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan seperti pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan berupa keringanan penjatuhan pidana atau kebebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Selanjutnya saksi mahkota (*koorn getuide*) dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi yang telah dilakukan karena sesungguhnya saksi mahkota (*koorn getuide*) adalah pelaku tindak pidana yang menjadi saksi terhadap terdakwa lain dalam kasus yang sama.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Nurhidayat Saputra,²⁶ berjudul “ Saksi Mahkota Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Perspektif Hukum Islam ”. Hasil penelitian ini dikatakan bahwa sebagian pendapat tidak setuju dengan saksi mahkota dikarenakan kemungkinan bahwa saksi mahkota tidak dapat dipercaya, karena saksi mahkota sendiri mungkin seorang penjahat yang dengan cara ini juga dapat menghindari hukumannya. Oleh karena itu pemakaian saksi-saksi mahkota hanyalah dibenarkan bila terjadi kemustahilan yang nyata untuk memecahkan kejahatan dengan cara lain. Dalam praktek selalu diadakan pengujian yang seksama sebelum diputuskan untuk memakai seorang saksi sebagai saksi mahkota. Sedangkan dalam perspektif Islam secara tidak langsung menekankan setuju dengan adanya saksi mahkota karena Allah SWT memerintahkan agar tetap memberikan kesaksian yang secara psikologis sangat berat itu (maksudnya sangat

²⁵ Dwi Tania Wisna Yuliantari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2018.

²⁶ Nurhidayat Saputra, “*Saksi Mahkota Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar Tahun 2014.

berat itu adalah menjadi saksi atas terdakwa meskipun itu adalah keluarga sendiri), firman Allah dalam QS al-Nisa 4: 135.

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Michael Paulus Siregar,²⁷ berjudul “Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Hasil penelitian ini adalah Pada dasarnya didalam praktik keberadaan kedudukan hukum saksi mahkota dalam tatanan Sistem Peradilan Pidana dianggap Sah secara hukum, penggunaan saksi mahkota dibenarkan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, dalam perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHP. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan esensi sebagai terdakwa dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka perlu dicari suatu solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik.

Dari beberapa karya tulis tersebut diatas, nampak ada persamaan dan perbedaan dari judul skripsi yang akan penulis lakukan, karena penulis akan membahas **Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Study Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/Mdn)**. Persamaannya terletak pada topik pembahasan semuanya membahas tentang saksi mahkota ada yang membahas mengenai kedudukan, peran serta, keabsahannya sebagai alat bukti, dan perlindungan hukum terhadap saksi tersebut.

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang akan di kaji oleh penulis adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017, dan dalam hal kasus pembuktian kasus penadahan. Oleh karena itu, apa yang penulis bahas dalam penelitian ini, merupakan suatu yang terdapat perbedaan dengan penelitian lain yang sudah dipaparkan tersebut diatas.

²⁷ Michael Paulus Siregar, “Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2016.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁸

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif/doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.²⁹ Dalam hal ini penulis akan mengkaji Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Study Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn).

2. Sumber Data

Yang dimaksud data disini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya punya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁰ Data primer penulis dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara 2016), hal. 24.

²⁹ Soetandyo, "*Mengkaji Dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial*", diakses dari Soetandyo.wordpress.com pada tanggal 10 Desember 2019.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group 2005), hal. 181.

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹

Data sekunder penulis dalam penelitian ini berupa kepustakaan yaitu buku-buku hukum, jurnal, kitab-kitab fiqh, al-quran dan hadis, atau data pendukung lain yang menunjang data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah studi pustaka atau library research: penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun kelapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam mencari data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditinjaklanjuti. Dengan kata lain penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.³² Dalam hal ini penulis mengumpulkan data mengenai pembuktian dan literatur tentang saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian.³³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif data yang diperoleh dihubungkan dengan literatur tentang penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana juga memperhatikan penerapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah alat-alat bukti dalam pembuktian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab adapun gambaran sistematikanya sebagai berikut:

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, hal. 182.

³² A. Rifqi Amin, "*Penelitian Kepustakaan (Library Research)*" diakses dari banjirembun.com, pada tanggal 10 Desember 2019

³³ Gumelar Ardiansyah, "*Pengertian Analisis Data*", diakses dari guruakuntansi.co.id, pada 10 Desember 2019

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Bab ini berisi Pembuktian meliputi pengetahuan, alat bukti, dasar hukum dan teori pembuktian. Kesaksian meliputi pengertian, dasar hukum, dan syarat-syarat kesaksian.

BAB III : Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn. Bab ini berisi profil Pengadilan Negeri Medan, posisi kasus, saksi mahkota, kedudukan saksi mahkota dan putusan hakim.

BAB IV : Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn. Bab ini berisi kriteria saksi, saksi tindak pidana penadahan dalam hukum pidana islam, nilai kesaksian dan penentu diterima/ditolaknya kesaksian.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan analisis hukum pidana islam tentang kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana (study putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn).

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SAKSI MAHKOTA PEMBUKTIAN DAN KESAKSIAN

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata bukti terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.³⁴

Menurut Munir Fuady³⁵ yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketaan dipengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

M Yahya Harahap³⁶ mendefinisikan pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan Bambang Poernomo yang secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekontruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*., hal. 2.

³⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti 2020), hal. 1.

³⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta; Sinar Grafika 2005), hal. 252.

menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.³⁷

Pembuktian sangat penting dalam sidang pengadilan, R Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti yang sangat penting. *Pertama*, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. *Kedua*, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Lebih lanjut R Subekti mengatakan pembuktian itu hanya diperlukan, apabila timbul suatu perselisihan. Jika tidak ada orang yang menyangkal hak milik saya atas rumah yang saya diami, maka saya tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik saya³⁸.

2. Alat Bukti

a. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi menurut M. Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.³⁹

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam pasal 185 KUHAP, berbunyi:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*., hal. 5.

³⁸ R Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Pradnya Paratama 1995), hal.1

³⁹ R Subekti, *Hukum Pembuktian*., hal. 17.

2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain
- b. Keterangan ahli;

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Andi Hamzah dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu

tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti :

1. Pasal 1 angka 28 Pasal ini memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, membuat pengertian :⁴⁰
 - a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
 - b. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.
2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaikbaiknya.
3. Pasal 133 (1) KUHAP Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
4. Pasal 179 KUHAP menyatakan:

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.*, hal. 298.

- a. Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- b. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat (1). Menurut Yahya Harahap ada dua kelompok ahli :⁴¹

- (1) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- (2) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

c. Surat;

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.*, hal. 300.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁴²

d. Petunjuk;

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut :⁴³

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan Saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan Terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dengan paparan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

e. Keterangan terdakwa.

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

⁴² M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.*, hal. 241.

⁴³ *KUHP & KUHAP.*, hal. 57.

2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagaian dari perbuatan atau keadaan.⁴⁴ Alat bukti keterangan terdakwa perlu untuk didengar hakim harus mendengar keterangan dari kedua belah pihak, dan alasan-alasan apa saja yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana. Hal ini dapat menjadi pertimbangan di dalam memberikan hukuman.

3. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam hal perkara pidana, KUHAP telah memiliki dasar hukum pembuktian tersendiri, yaitu terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202. Pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang.

Adapun maksud dari pasal tersebut ialah, *Pertama*, untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan minimum pembuktian yang ditetapkan undang-undang. *Kedua*, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*., hal. 273.

ditetapkan undang-undang, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh menghukum terdakwa tersebut. Bukankah tujuan Hukum Pidana itu ialah menjatuhkan pidana/hukuman yang setimpal kepada si pembuat tindak pidana untuk mengamankan masyarakat dan negara.⁴⁵

Jadi dapat dipahami bahwa untuk mencari titik terang dalam suatu perkara pidana diperlukan adanya pembuktian dan dalam pembuktian juga telah diatur hakim baru dapat menjatuhkan sanksi minimal dengan dua alat bukti yang sah yang telah diatur dalam undang-undang serta hakimlah yang memegang otoritas alat-alat bukti yang bernilai dalam pembuktian.

4. Teori Pembuktian

- a. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang. Kongkretnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan bagaimana hakim caranya hakim memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Hal ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam hukum acara pidana. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat pelengkap saja.⁴⁶

- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*)

⁴⁵ R Subekti, *Hukum Pembuktian*., hal. 8.

⁴⁶ Eddy O. S Hiarij, *Hukum Acara Pidana*, (tanggerang selatan; Universitas terbuka 2017), Hal. 628.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi, bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada, tetapi kalau hakim sudah yakin maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya, dalam memutuskan perkara hakim menjadi subjektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas aneh.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang Logis (*conviction in raisone*)

Sistem pembuktian *conviction in raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan di sini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak disyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “reasoning” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “reasonable” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁴⁷

⁴⁷ Eddy O. S Hiariej, *Hukum Acara Pidana.*, hal .629.

- d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat melekat adanya anasir-anasir:

- 1) Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan dengan undang-undang;
- 2) Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin, baik secara materiel maupun secara prosedural.

Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk*, istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang

maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatif ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana.
- 2) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan. Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Akan tetapi, dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.⁴⁸

B. Kesaksian

1. Pengertian Kesaksian

⁴⁸ Eddy O. S Hiariej, *Hukum Acara Pidana.*, hal. 630.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberi keterangan yang membernarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *keempat*, saksi adalah bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.

Sedangkan dalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana. Merujuk pada pengetian saksi dalam kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum, dapat dikatakan bahwa pengertian saksi dalam kamus besar bahasa indonesia sangat luas dibandingkan dengan kamus hukum yang menefinisikan saksi sebagaimana yng terdapat dalam KUHAP.⁴⁹ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Dengan beberapa ketentuan tersebut berarti keterangan saksi adalah keterangan berdasarkan apa yang dia dengar, dia lihat atau dia alami secara langsung dan dengan hal tersebut kesaksian saksi testimonium de auditu yang secara harfiah berarti kesaksian yang diperoleh dari orang lain, atau tidak termasuk kesaksian keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP atau ketentuan saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.

2. Dasar Hukum Kesaksian

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian.*, hal. 56.

berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli (penjelasan Pasal 156 ayat (2) KUHAP). Selain itu, maka kemudian menurut Pasal 159, (1) hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan disidang. Penjelasan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi diantara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

Pasal ini memang perlu dilakukan oleh penuntut umum dimana guna memenuhi perintah ini, penuntut umum sedapat mungkin menempatkan mereka secara terpisah atau dalam suatu ruangan yang diawasi oleh seorang petugas kejaksaan, meskipun dalam praktek hal ini dapat dilaksanakan, tetapi kemungkinan untuk berhubungan antara satu saksi dengan saksi lainnya sebelum memberi keterangan dalam sidang dapat dilakukan oleh para saksi tersebut, sebab hubungan tersebut dapat saja terjadi diluar pengadilan baik secara langsung maupun melalui telepon misalnya. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).⁵⁰

3. Syarat-Syarat Kesaksian

Pada dasarnya setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat didengar sebagai saksi (pasal 1 angka 26 KUHAP), akan tetapi, dalam eksepsional sifatnya, seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

“kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

⁵⁰ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bogor; Ghalia Indonesia 2010), hal. 108.

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan akan-anak saudara terdakwa sampai derajat ke tiga;
- c. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang sama-sama sebagai terdakwa. Atau dalam pasal 170 ayat 1 (satu) KUHAP yaitu, mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka⁵¹

Selanjutnya, dapatlah disebutkan bahwa pada dasarnya ketentuan pasal 168 KUHAP itu merupakan asas ketika mereka masing-masing secara relatif tidak berwenang (*relatieve onbevoegheid*) memberikan kesaksian. Selain mereka secara relatif tidak berwenang memberikan kesaksian (Pasal 168 jo, Pasal 169 KUHAP), juga dikenal mereka secara absolut tidak berwenang memberi kesaksian (Pasal 171 KUHAP) dan mereka karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian (Pasal 170 KUHAP).

Pada mereka secara absolut tidak berwenang memberi kesaksian maka ketentuan Pasal 171 KUHAP limitatif menentukan bahwa:

“yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”

Kemudian, terhadap mereka yang pekerjaannya, harkat, martabat, atau jabatannya dapat diminta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, secara limitatif diatur pula pada Pasal 170 KUHAP yang berbunyi bahwa:

- (1) Mereka yang karena pekerjaannya, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban

⁵¹ Eddy O. S Hiariej, *Hukum Acara Pidana.*, hal. 623.

untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Berikutnya, apabila jikaji dari visi praktik peradilan pada hakikatnya agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian hendaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Syarat formal

Perihal syarat formal ini dalam praktik dasarnya diartikan bahwa pertama, keterangan saksi tersebut harus diberikan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP; Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP; serta pendapat Mahkamah Agung RI.

- 2) Syarat materiil

Perihal syarat materiil dapat dikonklusikan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 ayat (10) KUHAP ketika ditentukan bahwa:

“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengatahuannya itu,”

Jadi, dari konteks tersebut konkritnya secara materiil saksi tersebut menerangkan tentang” apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”⁵²

C. Saksi Dan Kesaksian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Saksi

Secara bahasa kata kesaksian (الشهادة) dalam Bahasa Arab terbentuk dari kata dasar (*syahida-yasyhadu*) yang di artikan dengan menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah*

⁵² Eddy O. S Hiariej, *Hukum Acara Pidana.*, hal. 624.

juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).⁵³ Sedangkan menurut Syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafad kesaksian didepan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan.⁵⁴

Saksi dalam hukum pidana islam disebut dengan *shahid* (saksi laki-laki) atau *shahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksud adalah manusia hidup.⁵⁵ Kesaksian dalam hukum acara perdata islam juga dikenal dengan sebutan *As- Syahadah*, menurut bahasa antara lain artinya;

- a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka ini sebagai saksi.

Menurut istilah Fuqaha *bayyinah* dengan *syahadah* itu sama artinya yaitu kesaksian, tetapi Ibnu Qoyyim mengartikan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Memberikan kesaksian asal hukumnya fardu Kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih menjadi fardu 'ain, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.⁵⁶

⁵³ M Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta; PT Pustaka Firdaus 1994), hal. 306.

⁵⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2004), hal. 73.

⁵⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Rajawali 1991), hal. 153.

⁵⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, hal. 75.

2. Dasar Hukum Saksi

Dasar hukum kewajiban untuk menjadi saksi didasarkan kepada firman allah swt yang berbunyi;

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”. (QS. Al-Baqarah 282).

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ

“Dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang bedosa hatinya”. (QS. Al-Baqarah 283).

وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مِنَ الْكَبَائِرِ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

“Apa yang diriwayatkan dari ibnu abbas semoga allah meridhoi kepadanya, bahwa ia berkata, tergolong dosa besar yaitu orang yang menyembunyikan kesaksian.

Berdasarkan ayat diatas, dapat di simpulkan barangsiapa yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran/hak, maka allah mengecamnya dengan memberikan dosa kepadanya, bahkan menurut pendapat ibnu abbas tergolong dosa besar.⁵⁷

3. Fungsi Saksi

Menurut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutupi kebenaran.⁵⁸ Saksi hanyalah cara pembuktian, dan cara untuk mengetahui mana yang benar. Oleh karenanya hakim berhak menolak menilai kesaksian itu, jikalau hakim merasa kesaksian itu benar, maka hakim memutuskan perkara dengan kesaksian, kalau tidak puas maka hakim boleh menolak.⁵⁹ Sedangkan menurut Tihani Sahrani⁶⁰ ada beberapa fungsi saksi sebagai berikut;

- 1) Membantu hakim dalam menundukkan dan memutuskan perkara

⁵⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, hal. 75.

⁵⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, hal. 125.

⁵⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang; Pustaka rizki Putra 1997), hal. 149.

⁶⁰ Tihani dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet-4*, (Jakarta; Rajawali Press 2004), hal. 115-121.

- 2) Mendorongnya terwujudnya sifat jujur
- 3) Untuk menegakan keadilan
- 4) Saksi sebagai salah satu alat bukti

Dalam pemeriksaan saksi-saksi, hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut, suatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi atas segala yang disampaikan. Kesaksian yang telah memenuhi syarat formal (*qadlaan*) dan materiil (*diyanatan*) mempunyai nilai pembuktian bebas, nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun terhadap hakim, hakim bebas menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan nuraninya bahkan hakim dapat mengesampingkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup dan berdasarkan argumentasi yang kuat. Jika kesaksian berasing-asing tentang beberapa kejadian yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka diserahkan kepada hakim dalam menghargai nilai kesaksian yang sedemikian kuat menurut keadaan.⁶¹

Dengan demikian saksi mempunyai fungsi yang sangat penting yakni, membantu hakim dalam memutuskan perkara, mendorong terwujudnya sifat jujur, untuk menegakan keadilan, saksi sebagai salah satu alat bukti serta saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutupi kebenaran.

4. Kedudukan Saksi

Kesaksian dalam hukum acara perdata islam juga dikenal dengan sebutan *As- Syahadah*, menurut bahasa antara lain artinya;

- a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka ini sebagai saksi.

⁶¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha.*, hal. 68.

Kesaksian merupakan alat bukti jadi wajar saja berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa kejadiannya, keterangan saksi umumnya lebih objektif ketimbang keterangan saksi dikarenakan banyaknya peristiwa atau keadaan hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya sehingga hanya kesaksian alat bukti yang masih tersedia. Namun ada kemungkinan saksi dengan sengaja dipalsukan oleh pihak yang berperkara, atau karena suatu peristiwa telah lama terjadinya mengakibatkan saksi tidak lagi dapat mengingat secara persis dan utuh, apalagi tidak setiap pengamatan terhadap kejadian dimaksudkan sebagai kesaksian sehingga pengamatan dan pengetahuan saksi kurang teliti dan tidak cermat sehingga dapat saja mengaburkan keterangan yang diberikan.⁶²

Menurut istilah *Fuqaha bayyinah* dengan *syahadah* itu sama artinya yaitu kesaksian, tetapi Ibnu Qoyyim mengartikan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sebagaimana besar pemeriksaan perkara pidana menggunakan alat bukti saksi, baik hukum acara Islam maupun hukum acara perdata sama-sama menganggap mutlak diperlukan, tidak hanya bersandar kepada keyakinan hakim saja karena keyakinan hakim itu sangat subjektif maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang objektif.

Unsur dasarnya adalah lafal “*asyhadu*” aku bersaksi, bukan dengan kata lain. Karena nash telah mensyaratkan lafal ini dan al-Qur’an memerintahkan dengan lafal ini dan juga pada kalimat ini lebih tegas tersirat sumpah mengenai pengertian atau pengetahuan terhadap sesuatu. Jika dikatakan “*asyhadu*”, aku telah bersaksi, tidak boleh karena kata kerja lampau menunjukkan sesuatu yang telah lalu, sementara kesaksian menunjukkan sesuatu yang actual. Kesaksian juga merupakan kewajiban peradilan atas hakim untuk mewajibkannya, hukum mendatangkan kesaksian dengan segala syarat-syaratnya merupakan keharusan.⁶³

⁶² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha.*, hal. 59.

⁶³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha.*, hal. 72.

5. Kriteria Saksi

Untuk dapat diterimanya persaksian, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap jarimah, syarat-syarat tersebut sebagai berikut;

a. Balig (dewasa).

Seorang saksi dalam setiap jarimah disyaratkan harus balig, Apabila belum balig (dewasa) maka persaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam al-Quran;

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu”. (QS. Al-baqarah; 282).

Lafaz رِجَالٌ menurut bahasa berarti laki-laki yang sudah dewasa dan tidak termasuk di dalamnya anak-anak di bawah umur, alasan lain adalah dalam hadis Nabi Saw;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ [رواه أحمد وأبو داود
والنسائي وابن ماجه والحاكم]

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw; bersabda “dihapuskan ketentuan hukum dari orang, (1) dari orang yang tidur sampai ia bangun, (2) dari orang gila sampai ia sembuh, (3) dari anak di bawah umur sampai ia dewasa. (diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i Ibn Majah, dan Al-hakim)⁶⁴

b. Berakal

Seorang saksi disyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan, yang mungkin dan yang tidak mungkin, serta mudarat dan manfaat. Dengan demikian, persaksian orang yang gila dan kurang sempurna akalnya (ma'tuh) tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan kepada hadis Aisyah yang telah disebut diatas, yang di dalamnya disebutkan ;

وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ

Dan dari orang gila sampai ia sembuh.⁶⁵

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hal. 43.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hal. 44.

c. Kuat ingatan

Seorang saksi di syaratkan harus mampu mengungatkan apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, di samping dapat dipercaya apa yang di katakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, persaksiannya tidak dapat diterima. Juga disamakan dengan lupa orang yang banyak keliru dan lalai. Akan tetapi kalau keliru atau salahnya hanya sedikit, persaksiannya masih dapat diterima. Alasan tidak diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang di katakannya tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksiannya.⁶⁶

d. Bapat berbicara

Seorang saksi disyaratkan harus bisa berbicara. Apabila ia bisu, status persaksiannya di perselisihkan oleh para ulama. Menurut Mazhab Hambali; *“orang yang bisu persaksiannya tidak bisa diterima, walaupun isyaratnya dapat di pahami, kecuali apabila ia dapat menulis. Dalam hal ini bisa melaksanakan persaksian dengan tulisannya”*.

Dalam Mazhab Hanafi juga persaksian orang yang bisu tidak bisa diterima, baik dengan isyarat maupun dengan tulisan. Adapun dalam Mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Sebagian ulama' Syafi'iyah dapat menerima persaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talak.

Akan tetapi, sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang bisu tidak dapat diterima, karena isyaratnya yang menggantikan ucapan itu hanya berlaku dalam keadaan darurat. Kalau orang yang bisu diterima isyaratnya sebagai pengganti ucapannya, seperti dalam nikah dan talak, hal itu merupakan keadaan darurat, karena tidak ada jalan lain selain dengan isyarat.

Namun dalam persaksian, kondisinya tidak bisa dianggap darurat karena masih banyak orang lain yang bisa berbicara yang dapat di gunakan sebagai saksi. Dalam mazhab Syia'ah Zaidiyah juga ada dua pendapat.

⁶⁶ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hal. 45.

Pendapat pertama memperbolehkan persaksian orang bisu, dan pendapat kedua tindak memperbolehkannya.⁶⁷

e. Dapat melihat

Kesaksian orang yang buta dapat diterima, sebagaimana halnya orang yang sehat, namun demikian, para ulama' berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian dari mereka mengatakan pendapat seperti yang kami katakan tadi. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat itu pun diriwayatkan secara Shahih dari Az-Zuhri, Atha', Al Qasim bin Muhammad, asy-Sya'bi, Syuraih, Ibnu Sirin, Hakam bin Utaibah, Rabi'ah, Yahya bin Sa'd Al Anshari, Ibnu Juraij, salah satu dari dua pendapat Al Hasan, salah satu dari dua pendapat Iyash bin Muawiyah, dan salah satu dari dua pendapat Ibnu Abi Laila. Pendapat itu pun merupakan pendapat Malik, Laits, Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman dan para sahabat nya.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa kesaksian orang yang buta boleh diterima pada perkara yang ia ketahui sebelum mengalami kebutaan. Namun tidak boleh diterima pada perkara yang terjadi setelah dia mengalami kebutaan. Pendapat ini merupakan pendapat Al Hasan Al Bashri dan salah satu dari dua pendapat Ibnu Abi Laila. Pendapat itu pun merupakan pendapat Abu Yusuf, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya.⁶⁸

Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa boleh menerima kesaksian orang yang buta pada perkara yang sifatnya sepele. Dalil atas pendapat ini adalah, Atsar yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata; *"mereka memperkenankan untuk menerima kesaksian orang yang buta pada sesuatu yang sifatnya sepele"*.

Sedangkan kelompok ulama lainnya lagi mengatakan bahwa kesaksian orang yang buta tidak dapat diterima sama sekali, kecuali dalam persoalan nasab. Pendapat ini merupakan pendapat Zuffar. Dalil untuk pendapat ini adalah riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur Abdurrazaq, dari waki', dari Abu Hanifah. Padahal orang-orang yang darinya riwayat ini di nukil, sama sekali tidak mengetahui adanya pendapat seperti ini.

⁶⁷ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hal. 46.

⁶⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al Muhalla* Jilid 13, (Jakarta; Pustaka Azzam 2016), hal. 71.

Sekelompok lainnya lagi mengatakan bahwa kesaksian orang yang buta itu tidak dapat diterima secara global. Dalilnya adalah atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ali bin Abi Thalib, dari Iyas bin Muawiyah, dan Al Hasan, dan An-Nakha'i. Bahwa keduanya memakruhkan menerima kesaksian orang yang buta. Namun Abu Hanifah mengatakan; *"kesaksian orang yang buta itu sama sekali tidak dapat diterima dalam kasus apapun, baik dalam kasus yang diketahui sebelum buta, maupun dalam kasus yang dia ketahui setelah buta"*.⁶⁹

f. Adil

Kesaksian semua orang yang adil yang diberikan untuk untuk orang lain itu dapat diterima, baik kesaksian itu menguntungkan maupun merugikan, seperti kesaksian ayah dan ibu untuk anak-anak serta orang tuanya, kesaksian anak laki-laki dan anak perempuan untuk kedua orang tua serta kakek-neneknya, kesaksian kakek-nenek untuk cucu-cucunya, kesaksian suami untuk istrinya, kesaksian istri untuk suaminya, kesaksian kerabat dekat satu sama lain, dan kesaksian keluarga jauh satu sama lain, tanpa ada perbedaan sedikitpun.⁷⁰

Sifat adil merupakan tambahan bagi syarat Islam yang harus dimiliki oleh para saksi, maksud adil adalah kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya dan mereka tidak dikenal sebagai orang yang biasa berdusta, sebagaimana firman Allah swt;

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS Ath-Thalaq [65]; 2).

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.. (al-baqarah [2]; 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

⁶⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al Muhalla* Jilid 13, hal. 72.

⁷⁰ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al Muhalla* Jilid 13, hal. 1.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. (QS. Al Hujuraat [49]: 6)

قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ

Tidak dibolehkan kesaksian seorang penghianat baik lelaki maupun perempuan, dan juga seorang pezina baik lelaki dan perempuan.

Para ahli fiqh berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam agama dan memiliki sifat *murū'ah* (wibawa). Kesalehan dalam agama terpenuhi dengan melaksanakan hal yang fardhu, sunnah dan menjahui hal yang diharamkan dan dimakruhkan, serta tidak melakukan perbuatan dosa besar dan menjauhi kebiasaan berbuat dosa-dosa kecil. Sedangkan *murū'ah* hendaknya seseorang melakukan perbuatan dengan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat baik dan meninggalkan apapun perbuatan yang menjelekkan dirinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanah dan bermuamalah dengan baik.⁷¹ Ini berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal ini tidak mungkin amnesia biasa. Imam Abu Hanifah berkata, “Sifat adil cukup dilihat dari keislaman secara *zhahir* dan tidak diketahui dari apa yang merusak kemuliaan dan kehormatannya, hal itu dalam hal harta benda bukan dalam hal *hudud*.⁷²

Adapun dalam terjemah kitab *al-muhalla* definisi orang yang adil adalah orang yang tidak diketahui pernah melakukan dosa besar⁷³, atau tidak diketahui pernah melakukan dosa kecil secara terang-terangan.⁷⁴ Sedangkan Sulaiman Rasjid⁷⁵ dalam Fiqh Islam mengemukakan profil saksi yang memiliki perilaku adil sebagai berikut;

- a. Menjauh dari dosa besar dan tidak terus menerus menjalankan dosa kecil

⁷¹ Hasby Ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang), hal. 57.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*., hal. 364.

⁷³ Dosa besar adalah dosa yang disebut Rasulullah Saw sebagai dosa besar, atau dosa yang terdapat ancaman terhadapnya sedangkan dosa kecil adalah dosa yang tidak ada ancaman terhadapnya.

⁷⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al Muhalla Jilid 12*, (Jakarta; Pustaka Azzam 2016), hal. 682.

⁷⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2013), hal. 491.

- b. Baik hati
- c. Dapat dipercaya sewaktu marah, tidak melanggar kessopanan
- d. Menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang setingkat dengan dia

Allah swt juga telah memerintahkan kita untuk memberikan kesaksian karenanya secara benar dalam al-Quran, berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kaena Allah, biarpun terjadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu”. (QS. An-nisaa’ : 135).⁷⁶

Lalu apakah kesaksian orang fasik yang teah bertobat dapat diterima, para ahli fiqih telah sepakat bahwa kesaksian orang fasik yang telah bertobat dapat diterima. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jika sifat kefasikannya adalah karena tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sebagaimana ferman allah swt.,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nuur [24];4).

Sebagian orang-orang mazhab maliki membolehkan peradilan dengan kesaksian orang-orang yang tidak adil karena dalam kondisi darurat, serta kesaksian orang-orang yang tidak dikenal keadilannya dalam urusan-urusan kecil.⁷⁷

g. Islam

Masalah kesaksian seorang kafir sama sekali tidak boleh diterima, baik kesaksian itu diberikan terhadap kafir atau terhadap muslim, kecuali terkait dengan wasiat yang dibuat dalam perjalanan saja. Karena terkait dengan dengan masalah ini dapat diterima kesaksian dua orang muslim atau dua

⁷⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al Muhalla Jilid 13.*, hal. 8.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, hal. 365.

orang kafir, dari agama manapun keduanya, atau kesaksian seorang kafir laki-laki dan dua kafir perempuan, atau kesaksian empat orang kafir perempuan.

Dalam permasalahan ini, orang-orang kafir itu harus disumpah disamping dimintai kesaksiannya, dan itu harus dilakukan setelah shalat, apapun shalat tersebut, meskipun itu setelah shalat ashar. Itu lebih kami sukai, karena Allah swt berfirman.

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثَمِينَ

“Lalu mereka berdua bersumpah dengan nama allah, jika kamu ragu-ragu, ‘(demi allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa’. (QS. Al Maa'idah ;106.)⁷⁸

Selanjutnya, keputusan diberikan berdasarkan kesaksian mereka. Jika setelah itu ada kesaksian dari kaum muslimin bahwa orang-orang kafir itu berdusta dalam kesaksiannya, maka dua muslim, atau satu orang muslim bersama dua orang muslimah, atau empat orang muslimah yang memberi kesaksian demikian harus bersumpah.

Allah Swt berfirman.

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

“lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: ‘sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima dari pada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri’. (QS. Al Maa'idah : 107).

Setelah itu, kesaksian yang diberikan orang-orang kafir tersebut dianulir atau dibatalkan. Dalilnya adalah firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

⁷⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al Muhalla Jilid 12.*, hal. 732.

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.” (QS. Al Hujurat: 6).*⁷⁹

Selain beberapa kriteria tersebut diatas, hukum syara’⁸⁰ juga mensyaratkan saksi tidak memiliki hambatan yang menghalangi diterimanya kesaksian seorang saksi adalah sebagai berikut;

1) Keluarga

Menurut Imam Malik kekeluargaan menghalangi diterimanya kesaksian. Diantaranya adalah tidak diterimanya kesaksian kedua orang tua atas anak-anak nya, kesaksian anak-anak atas kedua orang tuanya, dan kesaksian suami-istri atas pasangannya. Imam Abu Hanifah tidak mengizinkan kesaksian orang tua atas anak-anaknya, kesaksian anak-anak atas orang tuanya, dan kesaksian suami-istri atas pasangannya. Sedangkan mazhab Syafi’i, kesaksian orang tua atas anaknya sampai kebawah (keturunan berikutnya, seperti cucu) tidak diterima.

Demikian juga kesaksian anak atas kedua orang tuanya sampai keatas. Akan tetapi, sebagian fukaha mazhab Syafi’i menerimanya. Ulama Syafi’iyah menerima kesaksian suami-istri atas pasangannya. Dalam mazhab Hambali, kesaksian dua tiang nasab (orang tua dan anak) atas sesama mereka tidak diterima. Yaitu orang tua sampai ke atas walaupun dari pihak ibu dan anak sampai ke bawah, baik cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Demikian juga dengan kesaksian salah satu dari suami-istri atas pasangannya. Dalil dilarangnya kesaksian atas keluarga adalah hadis riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda, *“Tidak diterima kesaksian lawan, orang yang dicurigai, dan orang yang dalam permusuhan”*.

Zanin adalah orang yang dicurigai, sedangkan keluarga adalah orang yang pantas dicurigai karena adanya sifat saling menyayangi melalui hubungan kekeluargaan. Ulama Zahiriyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa kekeluargaan tidak menghalangi diterimanya kesaksian selama

⁷⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *Al Muhalla Jilid 12.*, hal. 773.

⁸⁰ *Hukum syara’ merupakan satu nama hukum yang disandarkan pada syari’at atau shari’ah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah swt dan Rasul, baik berbentuk tekstual maupun hasil pemahaman ulama’*

saksianya orang adil. Alasannya, kesaksian setiap adil diterima; baik atas seseorang maupun atas dirinya.⁸¹

2) Permusuhan

Mayoritas fukaha tidak menerima kesaksian seorang musuh atas musuhnya. Jika permusuhan terjadi antara saksi dengan orang yang disaksikan (*masyhud ‘alaihi*) dalam masalah dunia, seperti harta warisan, perdagangan, dan sejenisnya. Akan tetapi, jika kesaksiannya dalam hal marah karena Allah, kefasikan, atau keberanian tertuduh memperjuangkan ajaran Allah, kesaksian tersebut tidak gugur. Dengan demikian, kesaksian muslim atas nonmuslim hukumnya sah karena permusuhan agama bersifat umum. Tidak diterimanya kesaksian hanya dikarenakan permusuhan pribadi. Demikian pendapat Imam Malik, asy-Syafi’i, Ahmad bin Hambal, dan mazhab Zaidiyah.

Ulama Hanafiyah generasi akhir berpendapat bahwa kesaksian seorang musuh atas musuhnya tidak diterima jika permusuhannya dalam masalah dunia. Alasannya permusuhan dalam masalah dunia hukumnya haram. Barangsiapa siapa bermusuhan karena dunia, maka ucapannya tidak bisa dijamin kebenarannya. Akan tetapi, jika permusuhannya karena agama, tidak ada halangan untuk menerima kesaksiannya. Alasannya, hal ini menunjukkan kesempurnaan agama dan keadilan saksi. Contohnya, orang yang melihat kemungkaran dan kemungkaran tersebut tidak akan berhenti kecuali dengan melarangnya. Ulama Hanafiyah generasi awal berpendapat bahwa permusuhan karena dunia tidak bisa menghalangi kesaksian selama saksi tidak fasik karenanya, mengambil manfaat, atau menghindari bahaya melalui kesaksian yang ia berikan.

Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa kesaksian musuh terhadap musuhnya diterima jika orangnya tetap adil. Akan tetapi, ulama Hanafiyah generasi akhir tidak sependapat dengannya. Alasan mereka adalah hadits marfu’ riwayat Abu daud yang menyatakan, “*Tidak sah kesaksian laki-laki yang berkhianat dan perempuan yang berkhianat, laki-laki yang berzina*

⁸¹ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV*; di terjemahkan Ahsy Sakho Muhammad dkk dari “At Tafsir Al jina’il Al islami”, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hal. 200.

dan perempuan yang berzina, dan tidak juga kesaksian seseorang yang mendengar saudaranya”.

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa hukum disini tergantung kepada pribadi saksi. Jika permusuhannya dengan orang yang diberi kesaksian sampai kepada hal yang tidak halal, permusuhan tersebut menjadi cacat yang membuat kesaksian nya untuk siapapun dal dalam hal apapun ditolak. Jika permusuhannya tidak sampai pada hal yang tidak halal, ia tetap dianggap adil dan diterimakesaksiannya.

Ulama Zahiriyah menolak hadis diatas dari semua jalannya karena para rawinya tidak dikenal atau karena hadis tersebut mursal, mereka menggunakan firman Allah swt berikut sebagai dalil.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۖ اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa”. (QS. al-Maidah [5]: 8).

Mereka berpendapat bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil kepada para musuh. Jadi, orang yang menghukumi musuh, teman, atau kepada keduanya secara adil, memberi kesaksian dan berlaku adil kepada musuh, teman, atau kepada keduanya, kesaksiannya diterima dan hukumnya berlaku.⁸²

3) Tuduhan

Maksudnya, diantara saksi dan orang yang diberi kesaksian terjadi sesuatu yang mendorong munculnya praduga atau kecurigaan. Misalnya, saksi melobi orang yang diberi kesaksian berdasarkan kesaksiannya atau ada maslahat yang didapat saksi dari hasil kesaksiannya. Kesaksian seorang keluarga atas keluarganya dan musuh atas musuhnya termasuk kesaksian yang dicurigai. Banyak kesaksian lain yang layak dicurigai. Diantaranya adalah kesaksian teman atas temannya, kesaksian keryawan atas pimpinannya, kesaksian pembantu atas majikannya, kesaksian orang yang meminta, kesaksian wakil atas orang yang mewakilinya, atau kesaksian orang yang menghindari bahaya dan membawa manfaat untuk dirinya melalui kesaksian yang ia berikan.

⁸² Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV.*, hal. 202.

Dalil tidak diterimanya kesaksian orang yang dicurigai adalah firman Allah swt.

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ

“Dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak raguan”. (QS. al-Baqarah [2]: 282).

Juga hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda, “Tidak diperbolehkan kesaksian orang yang dicurigai”. Beliau juga bersabda, “Tidak boleh diperbolehkan kesaksian orang yang dicurigai dan dalam permusuhan”.

Zinnah adalah kecurigaan dan hinnah adalah permusuhan. Para fukaha tidak sependapat mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan tidak diterimanya kesaksian orang yang dicurigai. Sebagian menolak semua kesaksian pada semua kondisi yang sudah disebutkan dan sebagian lagi menolak dalam beberapa kondisi tertentu, bukan dalam kondisi yang lain atau pada sisi yang lain. Perbedaan ini bermula dari perbedaan pandangan mereka dalam menerapkan hukum.

Secara umum, bisa disimpulkan bahwa mayoritas fukaha mazhab Maliki, Hanafi, Syafi’i, Hanbali, dan Syi’ah Zaidiyah tidak menerima kesaksian orang yang dicurigai meski ada perbedaan dalam penerapannya. Sementara itu, ulama Zahiriyah tidak mempunyai pendapat dalam hal ini. Mereka berprinsip bahwa kesaksian bisa diterima selama saksi berlaku adil.⁸³

⁸³ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV.*, hal. 203.

BAB III

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1455/Pid.B/2017/Mdn

A. Profil Pengadilan Negeri Medan

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga Negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No.4 Tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab Undang-undang seperti kitab Undang-undang hukum acara pidana dan kitab Undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004. “ Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan umumnya”.
- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “ Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi.”
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan Negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya tersangka, (terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Adapun asas-asas dalam penyelenggara peradilan adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas *isonomia* atau *equality before the law*.
- b. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption of innocence*).
- c. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam undang-undang (*principle of legality*).
- d. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
- e. Pengadilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Asas ini dikenal sebagai *contente justite* atau *speedy trial* serta *fair trial*.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmidelikhed van het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur oleh undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*).

- j. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁸⁴

B. Posisi Kasus

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi akan tetapi pada bulan Juni tahun 2016 dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 bertempat di Pajak Tanjung Rejo Kel. Tanjung Rejo Kec, Medan Sunggal Kota Medan terdakwa Jiwa Sinulingga dengan bersengkongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan, dalam hal ini terdakwa membeli 1 (satu) buah anting mutiara kepada saksi Rahayu Astuti Binti Sugiarto yang dalam perkara ini dilakukan penuntutan terpisah (saksi mahkota).⁸⁵

Sekitar bulan Juni tahun 2016 saat saksi Rahayu Astuti Binti Sugiarto sedang bekerja dirumah saksi korban Rina Maharani sebagai pembantu rumah tangga, saksi Rahayu Astuti Binti Sugiarto tanpa izin telah mengambil 1 (satu) buah anting mutiara sebanyak 2 (dua) set dalam lemari saksi korban, setelah saksi Rahayu Astuti Binti Sugiarto mengambilnya, lalu kemudian dijual kepada terdakwa selaku pemilik toko emas J.Sinulingga di Pajak Tanjung Rejo yang dibeli terdakwa seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu). Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, saksi Rahayu Astuti Binti Sugiarto kembali mengambil perhiasan milik saksi korban dari dalam lemari berupa 1 (satu) buah cincin berlian dan dijual saksi Rahayu Astuti Binti Sugiarto lagi kepada terdakwa seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), saksi Rahayu Astuti Binti Sugiarto menjual perhiasan tersebut pada terdakwa tidak dilengkapi surat, terdakwa seharusnya patut menduga bahwa perhiasan emas yang dijual saksi Rahayu Astuti Binti Sugiarto tersebut diperoleh karena hasil kejahatannya, akan tetapi walaupun tidak dilengkapi surat, terdakwa tetap membelinya.⁸⁶

Bahwasanya membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat untung, menjual, menukarkan,

⁸⁴ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip 2003), hal. 19-20.

⁸⁵ Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn., hal. 3.

⁸⁶ Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn., hal. 4.

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan dan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 480 (1) KUHP.

Dalam proses pembuktian hakim Pengadilan Negeri Medan, terdapat kekurangan alat bukti meskipun ada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Untuk mencapai suatu pembuktian, maka Penuntut Umum mengangkat saksi Rahayu Astuti Binti Sugiarto, yang kedudukannya sebagai terdakwa dalam perkara berbeda, dijadikan sebagai saksi mahkota.

C. Saksi Mahkota

Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana. Definisi saksi mahkota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Namun kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: “menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri”.⁸⁷

Dalam Pasal 1 (angka 26) KUHAP, mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan

⁸⁷ Abi Jam'an Kurnia, “*Definisi saksi mahkota*” diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 22 Januari 2020.

ia alami sendiri.⁸⁸ Sedangkan dalam KUHAP istilah saksi mahkota tidak pernah dijelaskan, namun dalam praktik hukum acara pidana sudah banyak dijumpai. Saksi dikenal sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri Pasal 1 (angka 26). Menurut penulis oleh karena saksi mahkota adalah saksi yang secara tidak langsung memenuhi syarat untuk menjadi saksi yakni dapat memberikan keterangan tentang peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ini sesuai dengan definisi saksi mahkota menurut beberapa pakar hukum acara pidana, misalnya, H.P Pangabea⁸⁹ bahwa saksi mahkota yakni saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberi mahkota. Hari Sasangka dan Laily Rosita juga⁹⁰, bahwa dalam praktek, seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana, bisa dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lain.

Ini terjadi dalam kasus tindak pidana penadahan (putusan nomor ;1455/Pid.B/2017/PN.Mdn), dimana hakim menggunakan saksi Rahayu astuti Binti Sugiarto atas terdakwa Jiwa Sinulingga. Hakim mengangkat Rahayu Astuti Binti Sugiarto sebagai saksi mahkota karena beberapa alasan, yaitu kurangnya alat bukti dalam persidangan, sebagai petunjuk hakim dalam memutus perkara dan berpedoman pada ketentuan Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Penggunaan Saksi Mahkota juga dikenal dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, bahwa “Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam

⁸⁸ Pasal 1 angka 26 KUHAP.

⁸⁹ H.P. Pangabea, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung; PT Alumni 2014), hal. 99.

⁹⁰ Hari Sasangka Dan Laily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktis*, (Bandung; Mandar Maju) hal. 53.

hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Menurut Eddy O. Shiariej,⁹¹ saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa ketika kepadanya diberikan suatu “mahkota”. Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan maka dasarnya saksi mahkota itu: “bahwa saksi mahkota juga merupakan saksi dalam artian seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP). Berdasarkan praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi dari saksi mahkota yaitu

- a) Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, dan
- b) Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan Andi Hamzah mengatakan bahwa, saksi mahkota disalah artikan diindonesia. Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta didalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfincrimination* (mendakwa diri sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu. Terdakwa tidak bersumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.⁹² Sehubungan dengan saksi mahkota, syaratnya ialah dia bersedia membongkar komplotan itu. Di Italia sudah

⁹¹ Eddy O. S Hiariej, *Hukum Acara Pidana.*, hal. 625.

⁹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia.*, hal. 262.

diciptakan suatu undang-undang mengenai saksi mahkota, jika terdakwa yang paling ringan kesalahannya dalam komplotan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa mendapat pidana karena perbuatannya juga dipandang sangat serius, maka jaksa dapat berunding dengan dia yang jika dia bersedia membongkar jaringan komplotan itu dia akan dituntut pidana lebih ringan dibanding teman berbuatnya.

Saksi mahkota digunakan pada tindak pidana penyertaan yang dilakukan para terdakwa, penuntut umum melakukan pemisahan perkara. Hal demikian dibenarkan oleh undang-undang. Dan dimaksudkan agar pembuktian lebih mudah, karena terdakwa dalam salah satu perkara bisa dijadikan saksi, dan sebaliknya dalam perkara lain yang dipecah tersebut akan berstatus sebagai terdakwa. Status demikian sebenarnya bertentangan dengan larangan “mendakwa diri sendiri” (*selfincrimintion*), dan membuka kemungkinan pelaku tindak pidana memberikan keterangan tidak benar atau yang lebih dikenal timbulnya sumpah palsu. Kemungkinan itu dapat dimengerti, karena sebagai peserta pelaku tindak pidana (terdakwa), sulit kala ia menjadi saksi memojokkan terdakwa karena ia sendiri juga terdakwa. Akibatnya, karena sebelum memberikan keterangan sebagai saksi ia harus disumpah sehingga kebohongan yang ia lakukan berakibat terciptanya tindak pidana sumpah palsu. Dimungkinkannya terdakwa dapat dijadikan saksi, tindakan tersebut akan sangat berfaedah dalam keberhasilan pembuktian, karena keterangan yang diberikan diharapkan amat valid, karena yang bersangkutan mengetahui semua peristiwa tindak pidana yang didakwakan. Dari penilaian demikian, tercipta istilah “saksi kunci”, yang diartikan saksi yang amat penting. Saksi kunci inilah yang dalam praktik hukum kita disamakan dengan saksi mahkota. Memberikan makna saksi mahkota sebagaimana dikemukakan diatas, merupakan penyalahartian makna.

Di negara-negara yang mengenai istilah saksi mahkota (*crown witness*) maknanya tidak seperti yang kita kenal. Di Belanda makna saksi mahkota diterapkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang serius tetapi perannya amat ringan dibanding terdakwa lainnya. Mempertimbangkan kecilnya peran peserta tindak pidana, pelaku tersebut dikeluarkan dari status terdakwa. Hal itu dimungkinkan berdasar asas oportunitas yang dimiliki jaksa. Sedangkan di Italia telah menempatkan saksi mahkota dalam undang-undang. Bila seorang

melakukan tindak pidana bersama orang lain, dia juga tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana, tetapi kalau ia bersedia membantu membongkar tindak pidana yang berkualitas serius, orang tersebut akan dituntut dengan pidana yang lebih ringan dibanding dengan yang lain. Berbeda dengan Belanda atau Italian, Amerika Serikat menerapkan makna saksi mahkota tanpa diharuskan diharuskan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi dapat juga diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan sendirian. Jika ia pelaku mengakui kesalahannya dimuka jaksa, jaksa akan mengurangi tuntutan pidananya. Hal ini sejalan dengan *plea bargaining* yang diberlakukan di Amerika Serikat. Dalam praktik hukum menyalahgunaan makna saksi mahkota diperkirakan sulit dihilangkan, karena hal demikian dipandang efektif terhadap keberhasilan ataupun kemudahan pembuktian, selagi penuntut umum tangkas dalam menghindari terjadinya perekayasaanketarnagan saksi dan atau pun terdakwa.⁹³

Terlepas dari pro dan kontra istilah pembuktian dengan saksi mahkota tersebut, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Dalam Pasal 200 Rancangan KUHAP juga menyatakan bahwa : “(Ayat 1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut “(Ayat 2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri”.

⁹³ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung, PT Alumni 2011), hal. 67.

“(Ayat 3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.”⁹⁴

Keyakinan hakim terhadap kekuatan pembuktian kesaksian saksi mahkota tergantung kasus yang dihadapi, karena tidak semua kasus dapat mempergunakan saksi mahkota, hakim harus yakin apakah saksi tersebut menyatakan yang sebenarnya maupun tidak, dan saksi tersebut memiliki daya bukti atau tidak. Dan sengenai keyakinan hakim terhadap penggunaan saksi mahkota Jaksa penuntut supaya sedapat mungkin mengupayakan tambahan alat bukti lain karena penggunaan saksi mahkota masih jadi perdebatan. walaupun pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/.Mdn, hakim dalam menetapkan peristiwa kongkret dalam perkara tersebut, sudah mendasarkannya kepada ketentuan hukum pembuktian. Penulis berpendapat dengan begitu tidak semua kasus dapat mempergunakan saksi mahkota untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, hakim harus yakin apakah saksi tersebut menyatakan yang sebenarnya maupun tidak, dan saksi tersebut memiliki daya bukti atau tidak dalam persidangan serta penggunaan saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat digunakannya saksi mahkota dalam persidangan sebagai salah satu alat bukti atau sebaliknya.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya penulis mengelompokkan kriteria sebagai berikut. Pertama, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi tindak pidana penyertaan (*deelneming*). Kedua, dalam proses pembuktian terdapat minimnya alat bukti oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim yang bisa menghambat proses pembuktian. Ketiga oleh sebab itu dilakukan pemisahan perkara (*splitsing*), Sehingga saksi yang kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian, yang dapat dijadikan saksi tersebut adalah tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan. (*Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997, Yurinspudensi Mahkamah Agung Nomor 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990, dan RKUHAP Pasal 200 ayat 1*).

⁹⁴ Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn., hal. 16-17.

D. Kedudukan Saksi Mahkota dan Putusan Hakim

Menurut M Yahya Harahap⁹⁵ pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut penulis, dapat disimpulkan pembuktian adalah proses yang amat penting dalam persidangan karena selain untuk menentukan nasib terdakwa, pembuktian juga harus berdasarkan pada ketentuan yang telah tertuang dalam undang-undang sehingga jika dalam pembuktian ada undang-undang yang dilanggar maka pembuktian tersebut harus dipertanyakan keabsahannya.

Ada dua hal yang penting harus diketahui oleh hakim dalam proses perkara, yaitu hukum dan peristiwanya. Oleh karena itu, dalam proses berperkara yang harus dikemukakan oleh para pihak, adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya, karena secara *ex officio*, hakim dianggap harus mengetahui hukum sesuai dengan asas umum dalam hukum acara *ius curia novit*.⁹⁶ Secara teoritis, alat-alat bukti itu dapat berupa *evidence may be either oral (word spoken by a witness in court)* yaitu alat bukti yang diucapkan melalui mulut dipersidangan, terdiri dari kesaksian, pengakuan, dan sumpah. Kemudian alat bukti dokumen (*documentary evidence*) dan alat bukti barang (*material evidence*). Surat sebagai alat bukti dapat dikelompokkan kepada alat bukti dokumen, apabila yang dipersoalkan adalah isisnya, sebaliknya dapat dikelompokkan kepada alat bukti barang, apabila yang dipersoalkan/dipentingkan suratnya bukan sisinya.⁹⁷ Alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebut alat-alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

⁹⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali.*, hal. 252.

⁹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, (Bandung; Nuansa Aulia 2016), hal. 78.

⁹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian.*, hal. 105.

Jika dilihat dari segi kedekatan antara alat bukti dan fakta yang akan dibuktikannya, terdapat dua macam alat bukti, yaitu sebagai berikut:⁹⁸

- a. Alat bukti langsung (*direct evidence*) adalah alat bukti dimana saksi melihat langsung fakta yang akan di buktikan sehingga fakta tersebut terbukti langsung (dalam satu tahap saja) dengan adanya alat bukti tersebut.
- b. Adapun yang dimaksud dengan ala bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau yang disebut juga dengan alat bukti sirkumstansial adalah suatu alat bukti dimana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah di tarik kesimpulan-kesimpulan tertentu.

Kedudukan saksi mahkota dalam kasus ini ialah untuk membuktikan bahwa terdakwa telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin medapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan, atas kesaksian saksi yang berada di bawah sumpah. Saksi mahkota ini akan mengajukan persaksiannya secara benar karena dia akan diringankan pidananya.

Dalam kasus ini kesaksian Rahayu Astuti Binti Sugiarto sebagai saksi mahkota dibenarkan oleh Undang-Undang. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 27).⁹⁹ Sedangkan saksi Rahayu Astuti Binti Sugiarto disini merupakan saksi kunci untuk bisa mengadili terdakwa tindak pidana penadahan yakni Jiwa Sinulingga.

Adapun kesaksian Rahayu Astuti Binti Sugiarto sebagai saksi mahkota dalam kasus tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/Pn.Mdn, dan dibenarkan oleh majelis hakim ialah:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 pada malam hari, saksi telah mengambil 1 (satu) buah cincin berlian yang saksi jualkan di Pasar Tanjung Rejo di toko Mas J Sinulingga dengan harga Rp 2.000.000,- dan

⁹⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata.*, hal. 5.

⁹⁹ Pasal 1 angka 27 KUHP.

uang tersebut saksi gunakan untuk ongkos saksi dengan teman saksi Linda Ayu Agustina pulang ke kampung.

- b. Bahwa yang dituduhkan saksi korban kepada saksi mengambil barangbarangnya selain mengambil 1 (satu) buah cincin berlian, adalah tidak benar.¹⁰⁰

Oleh karena itu dalam putusan nomor 1455/Pid.B/2017/Pn.Mdn, hakim memutus perkara sebagai berikut¹⁰¹ :

1. Menyatakan terdakwa Jiwa Sinuligga sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jiwa Sinulingga, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku kas warna merah, dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Jiwa Sinulingga;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Tanpa adanya saksi mahkota, hakim tidak bisa memperkuat alat bukti lainnya yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, karena dikira saksi mahkotalah yang dapat dijadikan petunjuk hakim dalam memutus perkara penadahan tersebut, dengan adanya saksi mahkota pembuktian menjadi lebih jelas dan pembuktian menjadi lebih mudah.

Dalam hukum pembuktian kewenangan hakim menilai kekuatan alat-alat bukti dapat ditelusuri melalui pemahaman atas 4 (empat) klasifikasi sistem pembuktian dibawah ini :¹⁰²

- e. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

¹⁰⁰ Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn., hal. 9.

¹⁰¹ Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn., hal. 24.

¹⁰² Eddy O. S Hiariej, *Hukum Acara Pidana.*, Hal. 628-630.

- f. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*)
- g. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang Logis (*conviction in raisone*)
- h. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*).

Dari 4 sistem diatas, indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Berdasarkan Pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Andi Hamzah mengutip sikap mantan ketua Mahkamah Agung Wir jono Pridjodikoro yang mempertahankan sistem pembuktian atas 2 (dua) alasan:¹⁰³ sudah selayaknya harus ada kepercayaan hakim tentang kesalahan terdakwa dan berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam melakukan penilaian. Penulis sependapat dengan Andi Hamzah bahwa dalam pembuktian menggunakan alat bukti saksi selama didasari dengan undang-undang dan keyakinan hakim dalam memutus perkara menurut penulis sah-sah saja asalkan memenuhi syarat serta digunakan dalam keadaan tertentu, sesuai kebutuhan dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini penggunaan saksi mahkota.

Menurut penulis berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hakim cukup mempunyai 2 alat bukti salah satunya dengan saksi mahkota disertai ada keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Dengan begitu dapat disimpulkan hakim tidak dapat memutus perkara kecuali ada 2 alat bukti yang sah. Ini membuktikan bahwa saksi juga tidak dapat berdiri sendiri dan hakim harus memenuhi ketentuan hukum acara bahwa harus terdapat saksi lain dalam proses persidangan. Selain itu dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal asas yang bernama *unus testis nullu stestis*. Asas tersebut bermakna bahwa seorang saksi bukanlah saksi. Asas ini ternyata berlaku secara umum pada hukum acara di negara *civil law* seperti Indonesia. Namun pada Pasal 185 ayat (2) dan (3) diatur bahwa asas ini pada dasarnya dapat di sampingkan, bila keterangan saksi tersebut disertai dengan alat bukti lainnya.

¹⁰³ HP. Panggabean, *Hukum Pembuktian, Teori-Praktek dan Yurispudensi Indonesia*.,hal. 82.

Dalam teori hukum pembuktian agar alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti dipengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Diperkenankannya oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan sesuatu fakta.
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Dari kasus diatas terkait sahnya keterangan saksi mahkota dalam perkara Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn. Telah memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan diatas bahwa agar suatu alat bukti bisa dipakai dipengadilan, yakni: *Pertama*, tentang diperkenankannya oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti. Saksi mahkota yang dihadirkan merupakan saksi yang diperkenankan oleh undang-undang, berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan: “Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Kedua, *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu). Pada dasarnya Pasal 168 KUHAP tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP). Sehingga dilakukannya pemisahan perkara (*splitsing*) dalam penggunaan kesaksian saksi mahkota, jaksa berunding dengan terdakwa agar bisa membuka dan memberikan

¹⁰⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata.*, hal. 4.

kesaksian tentang kejahatan yang merupakan buntut dari hasil kejahatan yang dilakukannya jika terdakwa mengaku dan bersedia maka dengan begitu tuntutan terhadap dirinya bisa saja dikurangi atau lebih ringan. Saksi mahkota adalah seorang saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa yang diberikan mahkota. Dimana terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar seorang pelaku tindak pidana tertentu dapat dijadikan sebagai saksi mahkota, yakni mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bersedia membantu jaksa untuk meyakinkan hakim. Menurut hemat penulis, bentuk sikap tersebut menggambarkan salah satu dari bentuk pertaubatannya untuk tidak mengulangi perbuatan nya sehingga kesaksiannya patut dinilai kejujuran dalam persidangan.

Ketiga, Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan sesuatu fakta. penggunaan saksi mahkota yang statusnya merupakan terdakwa tindak pidana pencurian dalam Perkara *Nomor 1454/Pid.B/2017/PN.Medan*, dan kesaksiannya didengarkan sebagai alat bukti saksi untuk dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan. Hal ini disebabkan minimnya alat bukti saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri bahwa penadah telah benar-benar melakukan penadahan karena saksi merupakan pencuri yang menjual hasil kejahatannya kepada penadah maka jelas saksi tersebut tahu betul fakta yang terjadi.

Keempat, Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Menurut penulis keberadaan saksi mahkota dalam pembuktian sangatlah relevan selain saksi mahkota merupakan alat bukti langsung (*direct evidence*) sehingga mempunyai nilai untuk membuat fakta yang kurang jelas menjadi lebih jelas dengan adanya kesaksian saksi mahkota. Ini sesuai dengan pendapat Munir Fuady¹⁰⁵ yang mengatakan alat bukti yang relevan adalah suatu alat bukti dimana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan.

Dari pernyataan penulis diatas, disimpulkan dalam kasus perkara nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn. Saksi mahkota yang di hadirkan sesuai dengan teori

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata.*, hal. 27.

pembuktian ataupun sistem pembuktian terkait sahnyanya saksi dapat digunakan sebagai alat bukti. Selanjutnya, Penulis berpendapat, Fokus utama dari dipakainya saksi mahkota adalah sejauh mana kebenaran keterangan saksi dapat membuat fakta lebih jelas dari pada tidak adanya saksi tersebut dalam persidangan. Walaupun saksi tersebut merupakan saksi yang patut di perhatikan cara hidup dan kesusilaannya dan segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Jika menurut hakim yang menyidangkannya ternyata keterangan saksi mahkota tersebut cukup *reasonable* (beralasan). Keterangan saksi itu dapat diakui sebagai alat bukti langsung yang mempunyai nilai pembuktian. Jikalau demikian berarti kesaksian saksi mahkota yang ditafsirkan sebagai alat bukti seperti halnya saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam KUHAP yaitu kekuatan pembuktiannya bebas, tidak terikat. Hakim bebas menilainya untuk menarik kesimpulan perihal kesalahan terdakwa yang didasarkan pada keterangan yang diuraikan oleh saksi mahkota. Keterangan saksi mahkota juga tetap harus di sesuaikan dengan batas minimum pembuktian, artinya keterangan saksi mahkota harus di dukung dengan keterangan saksi yang lain, keterangan ahli, surat atau keterangan terdakwa, agar hakim dapat menarik petunjuk untuk memperoleh keyakinan perihal terbukti/tidak nya terdakwa.

Sehubungan dengan kedudukan saksi mahkota dalam Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn sebagai alat bukti saksi dalam persidangan juga telah memenuhi beberapa syarat-syarat yang mestinya dipenuhi, diantaranya adalah: saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi tindak pidana penyertaan (*deelneming*), proses pembuktian terdapat minimnya alat bukti oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim oleh sebab itu dilakukan pemisahan perkara (*splitsing*). Sehingga saksi yang kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian, yang dapat dijadikan saksi tersebut adalah tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan. (*Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997, Yurinsprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990, dan RKUHAP Pasal 200 ayat 1*).

Menurut penulis semua syarat-syarat yang disebutkan diatas sudah terpenuhi mulai dari minimnya alat bukti sehingga diambil salah satu pelaku kejahatan untuk dijadikan saksi, dilakukannya pemisahan berkas perkara sehingga kedudukannya bukan sebagai terdakwa lagi, pencuri dianggap perannya paling ringan karena pencuri hanya bisa menjual hasil pencuriannya kepada penadah sedang penadah jika tidak terbukti bisa saja dia melakukan banyak penadahan dari hasil pencurian yang terjadi diluar sana karena jika pencuri belum tertangkap maka penadah juga sulit untuk dibuktikan bahwa telah terjadi penadahan, begitupun syarat terjadinya tindak pidana penyertaan yang terjadi dalam kasus ini yang sedikit berbeda karena penyertaan terjadi dalam dua tindak pidana berbeda yang akan penulis jelaskan sebagai berikut: Tindak pidana penyertaan (*deelneming*) yakni meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana baik itu satu delik yang sama ataupun delik berbeda. Akan tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang erat dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu istilah terwujudnya tindak pidana.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut. “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “Keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsafan kerja sama. Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal balik bertanggung jawab bagi perbuatan bersama, sekadar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama.¹⁰⁶

Dalam Perkara Pidana *Nomor 1455/Pid.B/2017/PN Medan*, yang mengadili perkara Penadahan. Kedudukan saksi mahkota yang statusnya merupakan

¹⁰⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika 2005), hal.84.

terdakwa/tersangka tindak pidana pencurian dalam Perkara berbeda *Nomor 1454/Pid.B/2017/PN.Medan*. Kesaksiannya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi dan merupakan saksi kunci yang dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan, karena minimnya alat bukti saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri telah terjadi tindak pidana penadahan tersebut. Dalam kasus tersebut terdakwa kasus pencurian merupakan saksi mahkota yang dihadirkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan. Sehingga tindak pidana pencurian dan penadahan yang mereka lakukan adalah hal yang berbeda.

Oleh sebab itu penulis perlu memberikan pemaparan tentang penyertaan sebagai berikut :

Terkait penyertaan, KUHP mengaturnya dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62. Akan tetapi, pada subbab ini, pembahasan difokuskan pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam kedua pasal tersebut, siapa saja yang dikualifikasikan sebagai pelaku dan siapa saja yang dikatakan sebagai pembantudinyatakan secara tegas. Sama seperti percobaan, dalam penyertaan ada dua pandangan. *Pertama*, bahwa penyertaan adalah persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna. Dengan kata lain penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggung jawaban pidana pelaku (*straffungdehnungsgrund*). *Kedua*, dikemukakan oleh Pompe bahwa penyertaan adalah aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang. Artinya penyertaan dipandang sebagai perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana (*tatbestandsausdehnungsgrund*).¹⁰⁷

Eddy O.S. Hiariej¹⁰⁸ berpendapat sama dengan sebagian besar ahli hukum pidana Belanda yang menyatakan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Dasar argumentasinya : *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada buku kesatu KUHP perihal ketentuan umum. *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga*, dalam

¹⁰⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka 2016), hal.349

¹⁰⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*., hal.350.

dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto-kan* dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran.

Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur : “Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan. Ke-2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk supaya melakukan perbuatan”. Pasal 56 KUHP : “Dipidana Sebagai pembantu suatu kejahatan : ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan. Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku : 1) *Pleger* atau pelaku; 2) *Doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan; 3) *Medepleger* atau orang yang turut serta; dan 4) *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan. Sedangkan pembantu atau *medeplichtige* adalah: 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Selanjutnya terkait siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan, menurut Simons, dalam ajaran penyertaan biasanya dibagi dalam dua bentuk penyertaan, penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. *Pertama, zelfstandige deelneming* atau penyertaan yang berdiri sendiri adalah tindakan masing-masing peserta dalam melakukan suatu perbuatan pidana diberi penilaian atau klasifikasi tersendiri dan tindakan mereka diadili secara tersendiri pula. *Kedua, onzelfstandige deelneming* atau penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah dapat tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pula apakah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana ataukah bukan. Termasuk penyertaan yang berdiri sendiri adalah: *pleger, doenpleger, medepleger*. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah yang menggerakkan, dan yang membantu. Menurut Van Hamel, sistem KUHP kita membedakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah penyertaan yang berdiri sendiri.

Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan Pasal 56 adalah penyertaan yang tidak berdiri sendiri.¹⁰⁹

Menurut penulis kemunculan saksi mahkota yang merupakan tersangka/terdakwa ataupun terpidana kasus pencurian perkara nomor 1454/Pid.B/2017/PN.Mdn yang oleh penuntut umum diajukan menjadi saksi mahkota dalam pembuktian pidana perkara berbeda nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn, dimungkinkan menurut pandangan bahwa penyertaan adalah persoalan pertanggungjawaban pidana dengan kata lain penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggung jawaban pidana pelaku. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh penuntut umum diperbolehkan karena adanya tindak pidana penyertaan.

Selanjutnya kasus pencurian atau penadahan adalah suatu delik yang berbeda akan tetapi tindak pidana ini saling berhubungan dan merupakan tindak pidana penyertaan *zelfstandige deelneming* atau penyertaan yang berdiri sendiri adalah tindakan masing-masing peserta dalam melakukan suatu perbuatan pidana diberi penilaian atau klasifikasi tersendiri dan tindakan mereka diadili secara tersendiri pula. Dengan adanya penuntutan secara terpisah oleh penuntut umum maka memungkinkan adanya saksi mahkota. Ini sesuai dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej¹¹⁰ dalam hal penuntutan pidana, jika pelaku yang satu diadili secara terpisah dengan pelaku lain akan menimbulkan saksi mahkota.

Secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik. Para pakar memperdebatkan tentang penentuan “pelaku”. Karena rumusan Pasal 55 KUHP merumuskan “sebagai pelaku” memang ada perbedaan antara “pelaku” dengan “sebagai pelaku”. Namun, pada penerapannya terutama pada pertanggungjawabannya, telah diatur oleh undang-undang sehingga pada hakikatnya tidak bermanfaat untuk diperdebatkan.¹¹¹ Eddy O.S. Hiariej juga berpendapat jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apakah kedua-duanya *materieel dader*, atau pelaku yang

¹⁰⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*., hal.352.

¹¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*., hal.354.

¹¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*., hal. 79.

menyuruh lakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan untuk melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semua itu.¹¹²

Dari kasus diatas terkait sah nya keterangan saksi mahkota dalam 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn penulis memperhatikan putusan tersebut bahwa Mahkamah Agung membenarkan saksi mahkota sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil, saksi memberi keterangan dengan sumpah, ada persesuaian antara saksi satu dengan lainnya, substansi keterangan saksi di dukung oleh fakta bahwa saksi merupakan alat bukti langsung yang jika digunakan akan membuat fakta lebih jelas daripada tidak dipakainya alat bukti tersebut. Tidak heran bahwa mahkota dalam perkara tersebut diakui dan di jadikan alat bukti langsung sehingga sangat efisien dalam pembuktian.

Sedikitnya penulis menyimpulkan bahwa, Dalam Perkara Pidana *Nomor 1455/Pid.B/2017/PN Medan*, yang mengadili perkara Penadahan. Kedudukan saksi mahkota yang statusnya merupakan terdakwa yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam Perkara berbeda *Nomor 1454/Pid.B/2017/PN.Medan*. Kesaksiannya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi dan merupakan saksi kunci yang dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan, karena minimnya alat bukti saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri telah terjadi tindak pidana penadahan tersebut.

¹¹² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.*, hal.359.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEDUDUKAN SAKSI
MAHKOTA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
1455/Pid.B/2017/Mdn

A. Kriteria Saksi

Kesaksian merupakan perkataan dari seseorang yang berisi beberapa kabar (pemberitahuan) yang benar dan jelas tentang sesuatu kejadian yang ditujukan kepada pihak lain dengan tujuan khusus. Dalam penetapan suatu tindak pidana hakim sering kali menggunakan bukti kesaksian untuk menetapkan suatu tindak pidana. Mengingat kesaksian merupakan gambaran dan penjelasan dari seorang saksi yang telah melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri. Oleh karena itu kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dan harus dijaga keadilannya dan kebenarannya sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian tersebut terhindar dari bencana ketidakadilan dan kecurangan, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Maidah 5: 8).*

Dalam Pasal 1 angka 26 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dijelaskan bahwa saksi didefinisikan sebagai seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Secara umum dalam islam untuk dapat diterimanya persaksian, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap jarimah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹¹³

- a. Balig
- b. Berakal

¹¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hal. 43-47.

- c. Kuat Ingatan
- d. Dapat Berbicara
- e. Dapat melihat
- f. Adil
- g. Islam

Dalam hukum Islam selain saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri seperti isi Pasal 1 angka 26 KUHAP, ketentuan yang perlu dicermati kemudian adalah syarat adil dalam diri seorang saksi, dimana seorang saksi disyaratkan untuk adil, dalam hal ini para fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang adil dan terhindar dari kefasikan.

Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2 yaitu:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُمِْنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هٗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". (Q.S. At-Thalaq 65: 2).*

Adapun kebalikan dari sifat adil adalah fasik, yaitu orang yang selalu melakukan perbuatan haram, menonjolkan perbuatan maksiat, tidak menghiraukan perbuatan yang makruf/baik dan jujur, orang yang demikian itu kesaksiannya diragukan.

Seperti hal nya kesaksian seorang terdakwa/tersangka dalam hal ini saksi mahkota, karena saksi tersebut merupakan saksi yang sering dijumpai dalam pembuktian perkara pidana dan merupakan saksi kunci sehingga jika semua orang yang melakukan perbuatan fasik dihukumi tidak adil maka hukum saksi mahkota ini bagaimana apakah juga tidak bisa digunakan dalam keadaan darurat atau jika ada kebutuhan dalam pembuktian. Karena seorang saksi dikatakan harus adil, oleh karena itu perlu dijelaskan apa itu adil dan apakah seorang fasik itu tidak punya peluang untuk dikatakan adil dan bisa menjadi saksi.

Untuk menetapkan dan membuktikan sifat adil pada seseorang, para ulama berbeda pendapat diantaranya.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ فَرَى أَبُو حَنِفِيَّةٍ وَالظَّاهِرِيُّونَ أَنَّ الْعَدَالََةَ تَفْتَرِضُ فِي الشَّأِ هِدَ حَتَّى يَثْبُتَ جُرْحُهُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجْرَحِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الشَّأِ هِدَ قُبِلَتِ الشَّأِ هِدَةٌ دُونَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَتَحَرَّى عَنْ عَدَالَةِ الشَّأِ هِدَ

Para ahli fiqih terjadi perbedaan pendapat tentang penetapan keadilan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zhahiriyah, keadilan seseorang itu dapat diketahui dengan meminta pendapat dan penilaian dari tersangka. Apabila orang yang disaksikan perbuatannya menyatakan bahwa saksi bukan orang tercela maka ia (saksi) dianggap adil dan persaksiannya dapat diterima. Lain halnya ketika hakim menyatakan tentang adilnya saksi.¹¹⁴

وَقَالَ أَبُو حَنِفِيَّةٍ يَكْفِي فِي الْعَدَالَةِ ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ وَالْأَتْلَمُ مِنْهُ جُرْحَةٌ

Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya.¹¹⁵

وَيَرَى الْمَالِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَالْحَنَابِلَةُ وَالزَّيْدِيُّونَ وَمَعَهُمْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ، أَنْ يَتَحَرَّى الْقَاضِي عَنْ عَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَلَوْ لَمْ يَجْرَحْهُمْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ قَائِمٌ عَلَى شَهَادَةِ الْعَدْلِ فَوَجِبَ أَنْ يَتَأَكَّدَ الْقَاضِي مِنْ تَوْفُرِ صِفَةِ الْعَدَالَةِ فِي الشَّاهِدِ لِيَقْبَلَ شَهَادَتُهُ

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah serta Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi, untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim. Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya.¹¹⁶

Saksi mahkota adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya, dimana perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang dalam hukum islam tergolong dalam perbuatan dosa dan bisa dikatakan fasik. Seorang pelaku tindak pidana dapat disebut sebagai seorang pelaku dosa, dilihat dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut telah menyiratkan bahwasanya ia tidak memenuhi syarat adil dalam diri seorang

¹¹⁴ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hal. 404.

¹¹⁵ Al-Imam Al-Qodhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz VI, Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, hal. 211.

¹¹⁶ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hal. 405.

saksi. Seseorang dapat dikatakan adil jika ia menjauhi dosa-dosa besar serta menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil tersebut, akan tetapi syarat ini tidak dapat tidak terpenuhi oleh saksi mahkota karena perbuatan dosa dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Oleh karena dampak perbuatan dosa atas tindak pidana yang ditimbulkan baik bagi orang lain dan masyarakat secara umum dan dampak bagi dirinya sendiri maka perbuatan orang fasik dijadikan saksi tidak boleh dilakukan, akan tetapi bagi saksi mahkota yang dalam hal ini sudah melakukan perbuatan dosa tersebut, maka diharuskan untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْفَاسِقَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِذَا عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ. إِلَّا مَنْ كَانَ فَسَقُهُ
مِنْ قَبْلِ الْقَذْفِ, فَإِنَّ أَبَا حَنْفِيَّةٍ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ. وَالْجُمْهُورُ يَقُولُونَ
تُقْبَلُ

Dijelaskan bahwa Para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa kesaksian orang yang fasik dapat diterima apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika kesaksian itu terjadi sebelum melakukan qazaf. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat taubatnya diterima.¹¹⁷ Sedangkan sebagian orang-orang mazhab maliki membolehkan peradilan dengan kesaksian orang-orang yang tidak adil karena dalam kondisi darurat, serta kesaksian orang-orang yang tidak dikenal keadilannya dalam urusan-urusan kecil.¹¹⁸

Berasarkan beberapa klasifikasi adil menurut para imam, penulis lebih condong kepada pendapat bahwa untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim, apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya. Karena ini adalah klasifikasi adil yang sangat dinamis tidak terpaku pada bahwa adil adalah tidak pernah melakukan perbuatan dosa, maka bisa dikatakan sulit menemukan hal yang sedemikian adanya.

¹¹⁷ Al-Imam Al-Qodhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz VI, Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, hal. 211.

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*., hal. 365.

B. Saksi Tindak Pidana Penadahan Dalam Hukum Pidana Islam

Islam sebagai agama wahyu, mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) yang relevan untuk setiap zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dalam rangka mewujudkan hal itu, Islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*), dimana aturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau populer dengan istilah *al-maqashid al-syar'iyah*, yaitu: 1) memelihara agama (*hifdz al-din*), 2) memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), 3) memelihara akal (*hifdz al-aql*), 4) memelihara kehormatan atau keturunan (*hifdz al-nasl*), dan 5) memelihara harta (*hifdz al-mal*).¹¹⁹ Kelima *maqashid syar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fii al-dunya hasanah, wa fii al- akhirah hasanah*). Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi.¹²⁰

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut.

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda oranglain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S Al-Baqarah 2: 188).¹²¹

¹¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dawah Islamiyah al-Azhar, tt), hal.200.

¹²⁰ Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia.

¹²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 38.

Tindak pidana penadahan seperti yang dilakukan oleh Jiwa Sinuligga, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal ini membeli 1 (satu) buah anting mutiara dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapinya surat-surat, sehingga dapat diduga barang tersebut didapat dari hasil kejahatan, maka pelaku penadah ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مَنْ اشْتَرَى شَرْقَةً (أَي مَسْرُوقًا) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا شَرْقَةٌ، فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارَهَا (رواه البيهقي والحاكم)

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membeli barang curian, sedang ia mengetahui bahwa itu barang curian, ia ikut menanggung dosa dan kejahatannya.” (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi).¹²²

Namun hadits tersebut menunjukkan bahwa keharaman itu ada jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual adalah barang curian. *Maqhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) dari ungkapan ini ialah, jika pembeli tidak mengetahui maka dia tidak turut berdosa. Jika pihak pembeli tidak mengetahui maka penjual tetap berdosa. Sebab penjual tersebut berarti telah menjual sesuatu yang sebenarnya bukan hak miliknya. Ini karena barang curian sebenarnya adalah tetap hak milik bagi pemiliknya yang asli, bukan hak milik pencuri atau penjual barang pencurian.

Dari kasus penadahan yang telah terjadi adanya tindakan mendzalimi orang lain, mendukung kemungkaran, dan bergabung dengan pelaku dalam berbuat dosa. Allah berfirman Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: ...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah 5; 2).¹²³

Berdasarkan hadits tersebut perbuatan Jiwa Sinuligga yang membeli 1 (satu) buah anting mutiara dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rahayu Astuti Binti Sugiarto yang diketahuinya diperoleh dari pencurian, berarti dalam hal ini Jiwa Sinuligga ikut bergabung melakukan kejahatan dengan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.

¹²² Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, *Al-jami' Al-shaghir*, Juz II (Mesir; Darul Katib, 1967), hal.164.

¹²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hal.168.

Dalam *Hukum Pidana Islam*, pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai satu nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.¹²⁴ Sedangkan menurut Topo Santoso, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.¹²⁵ Sedangkan “menurut Sayyid Sabiq mencuri ialah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi”. Ayat mengenai pencurian terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah: 38).¹²⁶

Dalam hukum Islam pencurian itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pencurian yang hukumannya *hadd*.

Pencurian yang hukumannya *hadd* terbagi kepada dua bagian, yaitu :

a. Pencurian ringan (*sariqah sughra*).

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* adalah sebagai berikut :

فَأَمَّا السَّرِيقَةُ الصُّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”

b. Pencurian berat (*sariqah kubra*)

أَمَّا السَّرِيقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمَغَالَبَةِ

¹²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*., hal.82

¹²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2003), hal.128

¹²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., hal.174.

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”¹²⁷

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetepi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan, Dalam istilah lain pencurian berat disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.

2. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*.

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga terbagi dua bagian yaitu *pertama*: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. *Kedua*: Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan, contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.

Dalam hukum Islam *hadd* mengenai pencurian harus memenuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum dengan hukuman *hadd*. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya.

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

¹²⁷ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hal.514.

1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara'.

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak.

Untuk dikenakan hukuman *hadd* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman *hadd* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya.

4) Barang tersebut mencapai nishab pencurian

Nishab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *hadd* ialah seperempat dinar, dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.¹²⁸ Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah.

لَا تُقَطَّعُ يَدُ عَنْ عَشَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) متفق عليه .
واللفظ لمسلم

Dari Aisyah Radiyallahu Anha bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Tidak boleh diotong tangan seorang pencuri, kecuali (ia telah mencuri) sebesar seperempat dinar atau lebih." (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim).¹²⁹

c. Harta tersebut milik orang lain

Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya

¹²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hal.81.

¹²⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta; Darus Sunah Pers, Cet-8 2013), hal.358

seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

d. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri).

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman *hadd* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.

Dalam kasus penadahan yang dilakukan oleh Jiwa Sinuligga berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian yang hukumannya *ta'zir*, penadahan tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd* karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yakni, Jiwa Sinuligga tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain namun Jiwa Sinulingga membeli barang hasil curian walaupun barang yang dibeli telah memenuhi unsur-unsur yang bisa dikenai hukuman *hadd* yaitu barang yang dicuri berupa *mal mutaqqawwim* barang yang bergerak, barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nishab pencurian, serta adanya niat melawan hukum.

Sanksi *ta'zir* tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan dosa (*jawabir*) bagi pelakunya (*mujrim*), dan menyadarkannya dari perbuatan maksiat yang telah dilakukannya (*ta'dib*). Di samping itu *ta'zir* juga sebagai pencegah (*zawajir*) agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Tentunya pelaksanaan *ta'zir* ini dibarengi dengan pengembalian hak adami yang pernah dirampasnya kepada pemiliknya (baik individu, organisasi, perusahaan maupun negara), atau jika telah rusak, hilang, maka dengan mengganti sesuai dengan nilainya. Karena hak adami tidak gugur dengan taubat sebelum pelakunya menmengembalikan hak tersebut atau meminta kehalalannya.

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah.

1. Dengan saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minima dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua maka pencuri tidak dikenai hukuman.

Imam Abu Hanifah menambahkan persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kedaluwarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengembalian barang yang dicuri atau harganya. Anak tetapi ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kedaluwarsa ini. Dengan demikian, menurut mereka persaksian tetap diterima baik kedaluwarsa maupun tidak.

Disamping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk diterimanya persaksian, adanya pengaduan atau tuntutan dari orang yang memiliki atau menguasai barang yang dicuri. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut.

2. Dengan pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

3. Dengan sumpah

Dikalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka yang tidak mengakui perbuatannya maka korban dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (korban/pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan

keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia tersangka dikenai hukuman hadd. Akan tetapi, pendapat yang kuat dikalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.¹³⁰

Sedangkan Menurut Ahmad Wardi Muslich,¹³¹ penggunaan sumpah yang dikembalikan (*al-yamin al-mardudah*) sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang riskan dan kurang tepat, karena hukuman untuk tindak pidana ini sangatlah berat sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktiannya.

C. Nilai Kesaksian

Setiap alat bukti yang di ajukan jaksa penuntut umum dipersidangan yang bertujuan untuk membenarkan dakwaanya, mempunyai nilai pembuktian tersendiri, dalam arti tidak sama kekuatan mengikat dari setiap alat bukti tersebut. Nilai alat bukti tersebut dapat memengaruhi kebebasan hakim dalam hal menilai alat bukti.¹³² Kesaksian merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, harus hampir semua pembuktian pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Dalam hukum acara jinayah s aksi selain berposisi sebagai salah satu pihak dalam proses peradilan, juga merupakan salah satu alat bukti pertama yang akan diperiksa di persidangan¹³³

Saksi Mahkota atau *Kroon Getuige* adalah seseorang yang turut terlibat dalam suatu kejahatan dalam hal tindak pidana penyertaan, dimana ia diminta untuk menjadi saksi untuk membuktikan kejahatan tersebut dengan memberikan bukti-bukti penting lainnya terkait informasi-informasi yang diperlukan untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang terdapat minimnya alat bukti. Keberadaan saksi mahkota ini merupakan suatu keharusan, posisinya sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kesulitan dalam pembuktian yang minim alat bukti. Dimungkinkannya terdakwa dapat dijadikan saksi mahkota tindakan tersebut sangat berfaedah dalam keberhasilan pembuktian, karena keterangan yang diberikan diharapkan amat valid, karena yang

¹³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hal.88-89.

¹³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, hal.90.

¹³² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian.*, hal. 159.

¹³³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, hal. 66.

bersangkutan mengetahui semua peristiwa tindak pidana yang disakwakan. Dari penilaian demikian tercipta istilah “saksi kunci” yang diartikan saksi yang amat penting. Saksi kunci inilah yang dalam praktik hukum kita disamakan dengan saksi mahkota.¹³⁴

Menurut penulis saksi mahkota dalam pembuktian sangatlah memiliki nilai dalam pembuktian selain juga sangat relevan, saksi mahkota merupakan alat bukti langsung artinya merupakan saksi mata yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri bahkan karena sebagai pelaku bersama-sama, sehingga mempunyai nilai untuk membuat fakta yang kurang jelas menjadi lebih jelas dengan adanya kesaksian saksi mahkota. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim yang mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutupi kebenaran.¹³⁵

Selain itu keberadaan saksi mahkota dalam pembuktian yang minim alat bukti hal ini sesuai dengan aspek *maqasid asy-syar'iyah* yakni aspek kebutuhan yang bersifat *hajiyyah* tetapi tidak mencapai tingkat *daruriat*, yakni salah satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Dan seandainya apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.¹³⁶ Oleh karena itu, keberadaannya sangat mempunyai nilai selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya.

D. Penentu Diterima/Ditolaknya Kesaksian

Dalam pembuktian agar alat bukti kesaksian dapat dipakai sebagai alat bukti dipengadilan secara umum diperlukan syarat diperkenankannya untuk dipakai sebagai alat bukti, diantaranya saksi harus sudah, balig (berakal), kuat ingatan, dapat berbicara, dapat melihat, adil dan Islam. Selain saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri seperti isi Pasal 1 angka 26 KUHAP, ketentuan yang perlu dicermati kemudian dalam Islam adalah syarat adil dalam diri seorang saksi, dimana seorang saksi disyaratkan untuk adil, dalam hal ini para fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau

¹³⁴ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam acara pidana.*, hal. 65.

¹³⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif.*, hal. 125.

¹³⁶ Ahmad Sanusi dan Sohri, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Rajawali Pers 2015), hal. 250.

terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang mempunyai sifat adil.

Keberadaan saksi mahkota dalam pembuktian yang minim alat bukti hal ini sesuai dengan aspek *maqasid asy-syar'iyah* yakni aspek kebutuhan yang bersifat *hajiyyah* tetapi tidak mencapai tingkat *daruriat*, yakni salah satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Dan seandainya apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

Hal ini dijelaskan dalam kaidah:

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

“Tidak ada keharaman bersama darurat dan tiada kemakruhan bersama kecutuhan .

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Kebutuhan itu dapat menempati tempatnya darurat, baik kebutuhan yang umum maupun yang kebutuhan khusus.

Kaedah diatas memberikan penjelasan bahwa keringanan itu tidak dengan keadaan darurat saja tetapi juga diperbolehkan karena ada hajat (kebutuhan).

Selanjutnya dalam al-quran firman Allah SWT berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Baqarah 2 :173).¹³⁷

Berdasarkan ayat di atas maka tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukannya, dalam kondisi ini maka semua yang tidak dibolehkan dapat diperbolehkan menggunakannya.

Sama halnya dengan penggunaan saksi mahkota, maka peran saksi mahkota bukanlah tidak mungkin untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan merupakan prioritas penting sebagai alat bukti saksi. Melihat dampak kebutuhan yang ditimbulkan kejahatan yang terjadi dalam hal penyertaan dan

¹³⁷ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang; Basscom Multimedia Grafika 2015), hal. 80-82.

minimnya alat-alat bukti, apabila tidak segera untuk dapat terungkap dikarenakan sedikitnya pembuktian yang didapat oleh penyidik dan penuntut umum karena sifatnya yang rapi dan tanpa jejak, sehingga beresiko kepada ditutupnya kasus ini demi hukum dalam hal ini penegak hukum berada dalam kesulitan.

Sedangkan dalam ditolaknya kesaksian saksi mahkota, karena seorang saksi mahkota adalah seorang saksi pelaku tindak pidana dalam hal terjadi penyertaan, dimana terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar seorang pelaku tindak pidana tertentu dapat dijadikan sebagai saksi mahkota, yakni mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bersedia menjadi saksi, untuk menentukan apakah saksi merupakan seorang yang adil dan keterangannya dapat dipercaya atau tidak bohong.

Dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat 49: 6)*

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah memerintahkan untuk menanggukkan berita yang disampaikan oleh orang yang fasik. Dalam hal ini Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak secara mutlak berita yang dibawa atau diberikan oleh orang-orang fasik. Akan tetapi, diperintahkan agar mengklarifikasi kebenarannya terlebih dahulu baik kebenaran atas diri si pembawa berita tersebut terkait kedustaan dan kejujurannya maupun kebenaran dari isi berita itu.

Penulis berpendapat diterimanya saksi mahkota dalam pembuktian yang minim alat bukti hal ini sesuai dengan aspek *maqasid asy-syar'iyah* yakni aspek kebutuhan yang bersifat *hajiyyah* tetapi tidak mencapai tingkat *daruriyat*, yakni salah satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia, seandainya apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Sedangkan ditolaknya saksi mahkota karena dinilai

tidak adil lebih cenderung berbuat dosa dan dihukumi orang yang tidak adil yang diragukan kesaksiannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dirumuskan 2 (dua) simpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana *Nomor 1455/Pid.B/2017/PN Mdn*, yang mengadili perkara penadahan kesaksiannya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi dan merupakan saksi kunci yang dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan, karena minimnya alat bukti saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri. Dalam kasus tersebut penggunaan saksi mahkota telah sesuai dengan syarat-syarat penggunaan saksi mahkota mulai dari terjadinya tindak pidana penyertaan, minimnya alat bukti dan diambil salah satu pelaku kejahatan untuk dijadikan saksi, dilakukannya pemisahan berkas perkara sehingga kedudukannya bukan sebagai terdakwa lagi, dan yang dijadikan saksi adalah terdakwa yang peranannya dianggap paling ringan.
2. Dalam Hukum Pidana Islam kesaksian saksi mahkota dalam pembuktian yang terdapat minimnya alat bukti hal ini sesuai dengan kebutuhan *hajiyyat* yang tidak mencapai kebutuhan *daruriyyat* melihat ada kebutuhan dalam pembuktian dan dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan yang dilakukan ini jika tidak berhasil dibuktikan, selain itu adilnya seseorang saksi tergantung kepada penilaian hakim, apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya

B. Saran

1. Hendaknya para peneliti lebih gencar lagi dalam melakukan penelitian tentang kesaksian mahkota agar semua pihak tahu pentingnya penggunaan saksi mahkota untuk membongkar kejahatan tidak hanya yang bersifat serius dan terorganisir tetapi juga kejahatan yang lebih kecil tetapi sangat meresahkan masyarakat karena akan timbul peluang untuk melakukan kejahatan baru.
2. Pengaturan adanya saksi pelaku yang bekerjasama atau saksi mahkota hendaknya tidak menjadi sekedar rancangan undang-undang saja, akan tetapi dapat di sahkan menjadi undang-undang.

3. Pengaturan adanya syarat penggunaan saksi mahkota hendaknya juga dijelaskan apakah syarat tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan atau hanya beberapa saja

C. Kalimat Penutup

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan perlindungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kedudukan Saksi Mahkota (Study Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn)”.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga memungkinkan bagi upaya-upaya kearah penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan agar menjadikan skripsi ini lebih bermanfaat bagi pembacanya.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group 2014).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta; Sinar Grafika 2008).

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2012).

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika 2016).

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al Muhalla* Jilid 13, (Jakarta; Pustaka Azzam 2016).

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2004).

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al Muhalla* Jilid 12, (Jakarta; Pustaka Azzam 2016).

Al-Imam Al-Qodhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Juz VI, Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon.

Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV*; di terjemahkan Ahsa Sakho Muhammad dkk dari "At Tafsir Al jina'il Al islami", (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008).

Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dawah Islamiyah al-Azhar, tanpa tahun).

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Rajawali Pers 2015).

A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang; Basscom Multimedia Grafika 2015).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa 2008).

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta; Yayasan Pentafsir Al-Quran 1971).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka 2016).

Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Erlangga 2012).

Eddy O. S Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang selatan; Universitas terbuka 2017).

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, (Bandung; Nuansa Aulia 2016).

H.P. Pangabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung; PT Alumni 2014).

Hari Sasangka Dan Laily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Bandung; Mandar Maju 2003).

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung, PT Alumni 2011).

Hasby Ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang 1970).

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2006).

Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, *Al-jami' Al-shagir*, Juz II (Mesir; Darul Katib, 1967).

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika 2005).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti 2020).

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta; Sinar Grafika 2005).

Mohammad Taufik Makarao dan suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bogor; Ghalia Indonesia 2010).

M Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta; PT Pustaka Firdaus 1994).

Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta; Darus Sunah Pers, Cet-8 2013).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group 2005),

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang; Cv Karya Abadi Jaya 2015).

R Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Pradnya Paratama 1995).

Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung; Citra Aditya Bakti 2007).

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Rajawali 1991).

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip 2003).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2013).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta; Pena Pundi Aksara 2013).

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang; Pustaka rizki Putra 1997).

Tihani dan Sobari Sahrani , *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet-4*, (Jakarta; Rajawali Press 2004).

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2003).

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta; Prenadamedia Grub 2016).

Internet

Abi Jam'an Kurnia, *Definisi saksi mahkota*, di akses dari m.hukumonline.com, pada tanggal 22 Januari 2020

A. Rifqi Amin, "*Penelitian Kepustakaan (Library Research)*" diakses dari banjirembun.com, pada tanggal 10 Desember 2019

Albert Aries, "*Perbedaan Saksi Mahkota Dengan Justice Collaborator*", di akses dari <https://m.hukumonline.com> pada 4 Februari 2020.

Gumelar Ardiansyah, "*Pengertian Analisis Data*", diakses dari guruakuntansi.co.id, pada 10 Desember 2019

Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Penyertaan (Deelneming)” diakses dari <https://www.negarahukum.com> pada rabu 22 april 2020

Mon Ali, *Splitsing memungkinkan Pelanggaran Azaz Hukum*, diakses dari m.hukumonline.com, pada 22 Januari 2020

Soetandyo, *Mengkaji Dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial*, di akses dari Soetandyo.wordpress.com, pada 10 Desember 2019

Skripsi dan Jurnal

I Made Sukadana, Amirul, Lalu Parman, *Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian* “Dalam Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 2 Tahun 2018

Muh Amiruddin, *Tentang Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar* “Dalam Jurnal Jurisprudentie Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017

Dwi Tania Wisna Yuliantari, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*” (Mataram: Unram 2018).

Nurhidayat Saputra, Skripsi: “*Saksi Mahkota Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Perspektif Hukum Islam*” (Makasar: Uin Alaudin Makasar 2014).

Michael Paulus Siregar, Skripsi: “*Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana*” (Yogyakarta: Universitas Atmajaya 2016.

Peraturan Perundang-undangan dan Direktori Putusan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Surabaya; Kesindo Utama 2015).

Direktori Putusan Nomor 1454/Pid.B/2017/PN Mdn , diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 4 Februari 2020

Direktori Putusan Nomor 1455/Pid.B/2017/PN.Mdn , diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 4 Februari 2020

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Kejaksaan Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Fathor Rosi

Tempat dan Tanggal Lahir : Sampang, 17 April 1997

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Tinggal : Dusun Soro'an Desa Marparan RT 001/ RW 002
Kecamatan Sreseh , Kabupaten Sampang

Riwayat pendidikan

1. SD NEGERI Marparan Tahun Lulus 2009
2. MTS AN-nur Marparan Tahun Lulus 2012
3. MA Al-Bukhary Labuhan Tahun Lulus 2015
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Angkatan 2015

Semarang, 20 Juni 2020

Penulis,



MOH FATHOR ROSI